

**LAPORAN PENELITIAN KOLABORATIF**

# **FENOMENA PERDAGANGAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PENELITI**

**NEILA SUSANTI, SOS., M.Si**

**KETUA**

**EVA INDRIANI**

**ANGGOTA**

**BUDI OKTO RIZALDI NANDA**

**ANGGOTA**



**PRODI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian ini berjudul:

### **Fenomena Perdagangan Anak di Provinsi Sumatera Utara**

Bidang penelitian : Penelitian Program Studi Sosiologi Agama

Kategori Penelitian : Penelitian Kolaboratif

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial

Waktu Penelitian : 2020

Lokasi Penelitian : Provinsi Sumatera Utara

Dana Penelitian : Rp. 12.000.000,-

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Medan, 3 November 2020

Peneliti

Prof. Dr. H. Ahmad Qorib, MA

NIP. 19580414 198703 1 002

Neila Susanti, S.Sos, M.Si

NIP. 19690728 199903 2 003

## **SURAT PERNYATAAN**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Neila Susanti, S.Sos, MSi

NIP : 196907281999032003

NIDN : 2028076902

Unit Kerja : FIS UIN SU Medan

Jabatan : Peneliti

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bahwa saya adalah benar-benar dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UIN SU dan tidak sedang tugas belajar.
2. Bahwa penelitian dengan judul : **Fenomena Perdagangan Anak di Provinsi Sumatera Utara** adalah benar-benar orisinal, bukan plagiasi serta belum/atau tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam,*

Medan, 3 November 2020

Ketua Tim,

(Neila Susanti, S.Sos, MSi)

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahhirabbil ‘Alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak rektor UIN-SU Medan yang dalam hal ini difungsikan melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ambil bagian dalam kegiatan penelitian Prodi Sosiologi Agama pada tahun 2020.

Penelitian tentang topik Fenomena Perdagangan Anak di provinsi Sumatera Utara merupakan topik penelitian yang penting dan sangat menarik. Dikatakan penting karena penelitian ini dapat dijadikan program studi Studi Sosiologi Agama FIS UIN SU sebagai referensi dalam mengembangkan kurikulum masalah sosial ataupun resolusi konflik sehingga tercapai kompetensi lulusan sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan pada Prodi Sosiologi Agama. Pada sisi hasil penelitian ini juga berguna bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam membangun kebijakan dan program penanganan perdagangan anak di Sumatera Utara, dan bagi masyarakat berguna untuk lebih berpartisipasi dalam penanganan perdagangan anak di Sumatera Utara ke depannya

Peneliti mengharapkan laporan penelitian ini dapat menjadi acuan praktis dan empiris dalam pengembangan penelitian-penelitian permasalahan sosial selanjutnya. Begitu juga, kami merancang adanya kerja lanjutan dari data temuan penelitian ini sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi UIN SU dan juga publik pada umumnya.

Medan, 3 November 2020

Peneliti

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Surat Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Abstraksi	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan Penelitian	4
4. manfaat Penelitian	4
5.Definisi Konsep	5
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
1. Defenisi Perdagangan Manusia	8
2. Sanksi Hukum Perdagangan Manusia	11
3. Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Jenis Penelitian	22
2. Lokasi Penelitian	23
3. Subyek Penelitian	23
4. Tehnik Pengumpulan data	24
5. Tehnik Analisa Data	24
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISA DATA</b>	
A. Gambaran umum Provinsi Sumatera Utara	26
1.1. Kondisi Geografis Wilayah	26
1.2. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan	31

1.2. Jumlah Penduduk	36
1.3. Pendidikan	37
B. Sekilas Sejarah Perdagangan Manusia di Sumatera Utara	40
C. Situasi Perdagangan Anak di Sumatera Utara	43
a. Besaran Kasus	45
b. Penyebab dan Bentuk eksploitasi Perdagangan Anak	48
c. Peta wilayah sumber asal anak yang diperdagangkan dan rute tujuan	58
d. Pola Pemindahan/Transportasi anak	65
e. Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Anak Oleh Pemerintah dan Masyarakat Sipil	75
f. Studi Kasus	92
g. Kompilasi Regulasi Propinsi Sumatera Utara Tentang Perdagangan Anak	102
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	87
Photo-photo kegiatan Penelitian	89
Lampiran kuesioner	96

## **Abstraction**

This research describes how the handling of child trafficking in North Sumatra in terms of policies, programs, human resources, and finance. The background of the research on children is that since the issuance of Law number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it has never been studied how the implementation of the four-state obligations. For that, it is important to be seen and studied. This study used a qualitative approach with the research subjects to handle child trafficking in North Sumatra province. Data collection was carried out by interview using interview guidelines and secondary data collection. As for the results of his research, it was found that the province of North Sumatra issued a law on child protection after having previously signed a regional regulation on the elimination of trafficking in women and children in 2005. Likewise, the province of North Sumatra made SOPs for handling. However, the issue of coordination and synergy between institutions remains a challenge. Data is also still a problem, especially in eliminating repetitive data. This requires attention between stakeholders in handling child trafficking in North Sumatra

**Keywords:** Child Trafficking, Handling of victims, policies, North Sumatra Province

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

*“Yati (15 tahun, bukan nama sebenarnya) duduk ketakutan dipojok tempat tidur, berteriak memanggil dengan suara keras ibu dan bapaknya, menangis ketakutan, menggigiti kuku-kukunya, dan menendang-nendang kakinya sambil menjambak rambut. Beberapa konselor dan perawat sedari tadi berusaha menenangkannya sambil memeluk dengan penuh kasih. Air mata yang menetes bercampur dengan rasa marah dan benci luar biasa, “aku mau mati Bu, aku mau mati, aku gak mau hidup, aku gak berguna Bu....”*

(Yati–korban perdagangan anak yang dilacurkan)

### **1. Latar Belakang**

Kisah Yati adalah sebagian kecil derita yang dialami oleh anak perempuan yang menjadi korban perdagangan anak yang dijual ke luar negeri. Trauma yang dialami anak yang menjadi korban perdagangan anak seperti Yati umumnya merupakan akibat dari kejadian-kejadian yang telah dilaluinya, mulai dari berbagai tindakan pemaksaan, pengekangan, hingga penyiksaan. Tentu saja, itu mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi perkembangan psikologis korban. Apalagi, hal tersebut harus dihadapi di tempat-tempat yang jauh dari akar sosial dan keluarga yang selama ini memberikan rasa aman pada dirinya.



Kasus yang menimpa anak-anak yang diperdagangkan tidak selalu seperti Yati. Berbagai kasus menunjukkan beraneka ragamnya jenis eksploitasi yang terjadi pada anak-anak tersebut, di antaranya menjadi buruh migran legal ataupun ilegal, pekerja rumah tangga migran, pekerja seks komersial atau eksploitasi seksual (termasuk pedofilia), anak adopsi palsu, pengantin anak pesanan, dijadikan pengemis, dijadikan pelaku industri pornografi, dijadikan pengedar obat terlarang, korban penjualan organ tubuh, dll. Meski demikian, seluruhnya bermakna sama bagi anak-anak yang menjadi korbannya: penderitaan. Penderitaan yang sangat dahsyat.

Di sisi lain, aturan hukum terkait tindak pidana perdagangan anak saat ini tidak cukup banyak memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan anak. Pasal 297 KUHP misalnya merumuskan bahwa perdagangan perempuan dan perdagangan anak diancam dengan pidana paling lama 6 tahun.<sup>1</sup> Rendahnya ancaman hukuman ini tentu saja tidak membuat pelaku perdagangan anak takut dan berhenti melakukan kejahatan terhadap anak. Begitu pula halnya aturan-aturan normatif di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup>Sudah sejak lama pasal ini disoroti sebagai pasal yang perlu diamandemen, karena dianggap tidak memadai untuk menjerat pelaku perdagangan anak. Pasal lain, yang juga masih dianggap perlu diamendir adalah pasal 324 tentang perbudakan. Sejak 2005, ketika Menteri urusan Perempuan Meutia Hatta mempersoalkan kedua pasal itu bermasalah, mulai muncul berbagai alternatif perumusan, misalnya sebagaimana terlihat pada pasal 526 RUU KUHP. Rumusan alternatif itulah yang akhirnya mengilhami lahirnya UU No. 21/2007 tentang perdagangan orang. Lihat: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12773/pasal-297-kuhp-seharusnya-diamandemen-untuk-menjangkau-itransnational-trafficking>

dan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Tidak mengherankan bila harapan pemberantasan dan pencegahan terhadap perdagangan orang diembankan kepada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meski tidak spesifik menekankan masalah perdagangan anak, setidaknya UU tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum yang lebih kuat untuk memberantas perdagangan anak di Indonesia. Tambahan lagi, komitmen pemerintah Indonesia dalam masalah ini juga tampak dari ditandatanganinya aturan internasional berupa Konvensi maupun Protokol yang terkait dengan perdagangan anak.

### **Fenomena Perdagangan Anak di Indonesia sejak 2007**

Meskipun ada berbagai upaya legal perlindungan anak dari praktek perdagangan dan migrasi anak, angka kasus perdagangan anak di Indonesia tetap tinggi. Bahkan setelah UU No. 21/2007 menegaskan kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan khusus, berbagai data menunjukkan bahwa perdagangan anak masih merupakan kejahatan dengan kecenderungan yang terus meningkat.

Sebuah data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sekitar 100.000 perempuan dan anak Indonesia menjadi objek *trafficking* per

tahun.<sup>2</sup> Mereka diperdagangkan untuk berbagai macam tujuan: eksploitasi seks komersial, kerja-domestik (PRT), perbudakan, kawin paksa, dan perburuan anak.<sup>3</sup> Menyangkut perdagangan anak saja, jumlah yang terjadi di Indonesia mencapai 1.116 orang yang terbagi antaranya adalah 950 korban anak perempuan dan 166 korban anak laki-laki<sup>4</sup>. Negara tujuannya antara lain adalah Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Jepang, Amerika Serikat, Chile, dan Filipina. Sementara itu wilayah yang tercatat menjadi sumber pemasok perdagangan anak di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Banten, Riau, dll.

### **Berbagai Kerancuan Data tentang Fenomena Perdagangan Orang dan Perdagangan Anak**

---

<sup>2</sup> UNICEF-Indonesia, "Overview-Child Protection," <http://www.unicef.org/indonesia/protection.html> (last visited Jan. 28, 2010), dikutip dari The Protection Project (2009), "A Human Rights Report on Trafficking in Persons, Especially Women and Children," lihat: <http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Indonesia.pdf>

<sup>3</sup> Sutinah Sutinah and Karen Mwendu, Trafficking of Women and children in East Java, Indonesia, *Journal of International Women Studies*, volume 20, December 2019

<sup>4</sup> Data tersebut mencakup dalam periode Maret 2015 hingga Desember 2019. Data disampaikan oleh *National Project Coordinator Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for Migration (IOM)*, Lihat: <http://news.okezone.com/read/2019/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>

Menarik untuk memperlihatkan kenyataan bahwa data-data mengenai perdagangan orang, khususnya jika dibandingkan dengan data khusus perdagangan anak, masih terlalu simpang-siur untuk ditelusuri. Banyak sumber membeberkan data yang konsistensinya meragukan dan membutuhkan verifikasi. Sebagai gambaran, di Sumatera Utara, kasus-kasus perdagangan manusia tiap tahun berjumlah ratusan. Secara akumulatif, jumlah keseluruhan kasus perdagangan orang di wilayah Sumut, sejak lima tahun terakhir (2015-2019), berjumlah 300 perkara. Tetapi jika data ini dikomparasikan dengan data nasional sebagaimana terpapar pada tabel di bawah, maka akan ditemukan banyak kerancuan. Misalnya data 2015 menjelaskan bahwa perdagangan orang di tingkat nasional berjumlah 205 kasus, padahal di Sumut saja sudah tercatat 255 kasus; pada 2016: Sumut (295), nasional (192); dan pada 2017: Sumut (495), nasional (32).

No	Tahun	JumlahKasus	Jumlah Korban			
			Dewasa		Anak	
			<i>Pr</i>	<i>Lk</i>	<i>Pr</i>	<i>Lk</i>
1.	<b>2015</b>	205	169	52	87	-
2.	<b>2016</b>	192	174	46	71	1
3.	<b>2017</b>	53	32	16	30	-
			<b>375</b>	<b>114</b>	<b>188</b>	<b>1</b>
TOTAL		<b>450</b>	<b>489</b>	<b>189</b>		
			<b>678</b>			

**Sumber:** diolah dari Ibid, *passim*

Kerancuan ini jelas sekali membingungkan dan menyesatkan. Yang sungguh lebih menyedihkan adalah bahwa kerancuan itu justru ditunjukkan dari pemaparan data oleh pemerintah sendiri melalui salah satu Deputi Kementeriannya, sebagaimana diperlihatkan melalui perbandingan data di atas. Ada inkonsistensi yang nyata-nyata terlihat dari pemaparan data nasional yang justru menunjukkan angka lebih kecil dibandingkan dengan pemaparan data di tingkat lokals elama tiga tahun berturut-turut (2015, 2016, dan 2017).

Namun dengan mengabaikan kerancuan pencatatan data-data seperti ditunjukkan di atas, contoh tabel data nasional yang dikutip itu mengilustrasikan sebuah kenyataan yang mengejukan, yakni:

[i] Setiap dua kasus perdagangan orang rata-rata menimbulkan 3 orang korban (dewasa maupun anak-anak); dan dari setiap 5 kasus perdagangan orang rata-rata menimbulkan 2 orang korban anak-anak.<sup>5</sup>

[ii] Dari seluruh korban kejahatan perdagangan manusia, anak-anak yang menjadi korbannya mencapai jumlah 29%-nya (yakni 788 korban berbanding 189 korban anak).

[iii] Dari seluruh korban perdagangan anak, korban terbesar adalah anak perempuan, sebesar 99,5%-nya (188 korban anak perempuan di antara 189 korban anak).

---

<sup>5</sup>Dihitung berdasarkan jumlah kasus dan rata-rata korban dari tabel di atas (450 kasus menimbulkan 678 korban, jadi rata-rata per kasus 1,5 korban dewasa dan anak-anak; sementara itu 450 kasus menimbulkan 189 korban anak, atau rata-rata kasus menimbulkan 0,4 korban anak).

## **Situasi *Law Enforcement* Pemberantasan Perdagangan Anak**

Selama beberapa tahun belakangan ini, mulai tumbuh berbagai inisiatif dari masyarakat untuk ikut membantu pemerintah memberantas perdagangan anak, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal itu tercermin dari banyaknya LSM yang aktif melakukan advokasi dalam isu ini.

Meskipun ada peningkatan upaya pemberantasan perdagangan anak yang muncul dari inisiatif masyarakat, hingga Juli 2019 Indonesia ditengarai sebagai negara yang tidak konsisten dan tidak serius melakukan tindakan pemberantasan atas jenis kejahatan tersebut. Sebuah laporan dari Departemen Luar Negeri AS menegaskan fakta ini.<sup>6</sup> Sebagai contoh, meskipun ada 134 kasus tersangka perdagangan anak sudah ditangani dan 79 di antaranya sudah dipidana pada 2018, tetapi lebih dari 200 kasus lainnya dihentikan penyidikannya di tingkat kepolisian.

## **2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah maupun cukup banyaknya peran serta masyarakat yang bergiat dalam perlindungan anak, salah satu hal yang dipandang kurang adalah data yang komprehensif, konsisten, dan akurat mengenai isu perdagangan anak

---

<sup>6</sup>Lihat *The Jakarta Post*, "Indonesia Lags in Dealing with Trafficking," 29 July 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/29/indonesia-lags-dealing-with-trafficking.html>

di Indonesia. Definisi konseptual mengenai perdagangan (dan migrasi) anak adalah definisi yang cukup rigit dan ketat; dan secara teoretis memiliki rujukan pada berbagai konvensi internasional yang sudah disepakati. Di samping itu secara legal kejahatan perdagangan anak adalah sebuah konstruksi spesifik yang dianggap sebagai delik khusus, di luar yang dirumuskan oleh delik umum atau delik khusus lain yang menyangkut kejahatan terhadap anak.

Isu perdagangan dan migrasi anak sejauh ini sering disamaratakan dengan isu perburuan anak, penculikan anak, penyiksaan anak, dll. Ini yang membuat data tentang perdagangan dan migrasi anak perlu diklarifikasi sesuai dengan konstruksi teoretis dan legalnya yang spesifik, agar upaya-upaya untuk pencegahannya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan, mekanisme, dan prosedur legal yang tepat.

Karena kenyataan inilah menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk melakukan kompilasi, konsolidasi, sistematisasi, dan strukturisasi data atas isu perdagangan dan migrasi anak dalam rangka memudahkan dokumentasi dan klasifikasinya sebagai delik khusus, dengan rumusan khusus, dan penanganan khusus pula.

Dengan demikian didapatlah rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Situasi Perdagangan Anak di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019?

2. Bagaimanakah penanganan perdagangan anak di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 termasuk dengan koordinasi di jajaran pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil dalam program penanganan, pencegahan, penanggulangan kejahatan perdagangan anak, termasuk didalamnya program rehabilitasi, dan reintegrasi korban, sebagaimana dipraktekkan selama ini di provinsi Sumatera Utara?

### **3. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memetakan, mengkonsolidasikan, mensistematisasi, mengklasifikasi, menstrukturisasi, dan mendokumentasikan situasi perdagangan anak dan penanganannya di provinsi Sumatera Utara di tahun 2019.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran:

1. Angka dan sebaran wilayah perdagangan anak selama tahun 2019,
2. Peta wilayah sumber asal anak yang diperdagangkan,
3. Pola proses pemindahan, termasuk rekrutmen, terhadap anak yang diperdagangkan,
4. Jalur/rute pemindahan anak hingga ke wilayah/negara tujuan,
5. Cara memperdaya anak yang diperdagangkan, termasuk bentuk-bentuk penipuan, kekerasan, penyiksaan, pengekangan, dll.



6. Jenis-jenis eksploitasi, termasuk pekerjaan, yang dialami oleh anak yang diperdagangkan.
7. Respond pemerintah dalam pencegahan dan penanganan
8. Sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil

#### **4. Manfaat Penelitian**

##### **Penelitian ini bermanfaat untuk**

- 4.1. Fakultas ilmu sosial UIN SU khususnya prodi Sosiologi Agama dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran masalah sosial termasuk sosiologi keluarga.
- 4.2. Pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar dalam perubahan kebijakan dan program penanganan perdagangan anak di Sumatera Utara
- 4.3. Masyarakat dalam berpartisipasi lebih aktif dalam penanganan perdagangan anak di Sumut

#### **5. Definisi Konsep**

Definisi konseptual perdagangan dan migrasi anak yang sering menjadi rujukan umum adalah sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya pada pasal-pasal 1, 2, 3, 4, dan 17:

*“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak*

*dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan tereksplotasinya anak tersebut.”*

Namun demikian, haruslah segera diberi catatan bahwa karena Indonesia sudah melakukan ratifikasi atas Protokol Palermo (yang dikeluarkan PBB pada 15 November 2000) mengenai “Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak” berdasarkan UU No. 14 Tahun 2009, maka secara spesifik definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan pengertian baru mengenai “perdagangan anak” sebagaimana dirumuskan dalam protokol itu. Dalam protokol tersebut, pengertian mengenai perdagangan dan migrasi anak pada kenyataannya sama dengan pengertian yang digunakan menurut definisi perdagangan orang, kecuali dengan menghilangkan unsur mengenai cara-caranya, yakni cara-cara pengebakan anak untuk dipindahkan.

Dengan menggunakan rumusan di atas, suatu tindakan baru dikategorikan sebagai “perdagangan (dan migrasi) anak” dan menjadi obyek dari penelitian ini apabila telah cukup memenuhi dua unsur pokoknya saja: yakni proses dipindahkannya sang anak, dan tujuan

perpindahannya untuk kepentingan eksploitasi, sedangkan mengenai caranya bisa diabaikan. Penghilangan bagian mengenai cara-cara anak dapat direkrut dan menjadi korban memang dianggap tidak relevan. Ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2009, khususnya pada pasal 3 (b), yang menekankan bahwa mengenai cara-cara bagaimana anak-anak yang menjadi korban perdagangan itu dijebak, ditipu, atau dikelabui untuk dipindahkan atau dimigrasi, bisa dianggap tidak perlu lagi digunakan.<sup>7</sup>

Penjelasan perbedaan perdagangan orang dengan perdagangan anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU. No. 14 tahun 2009, pasal 3(b) dapat dilihat definisi perdagangan anak yang disimpulkan meliputi Proses – Cara dan Tujuan seperti pada tabel di bawah ini

<b>PROSES</b>		<b>CARA (kolom cara ini tidak harus ada / tidak relevan bagi definisi perdagangan anak)</b>		<b>TUJUAN</b>
Perekrutan		Ancaman		Prostitusi
dan		atau		Atau
Pengiriman		Pemaksaan		Pornografi
Dan atau		Atau		Atau

---

<sup>7</sup> Lihat UU No. 14 Tahun 2009 pasal 3 (b). UU ini adalah UU untuk pengesahkan Protokol Palermo yang ditetapkan PBB pada 15 November 2000 untuk melengkapi Konvensi mengenai Pemberantasan Perdagangan Orang yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007.

Pemindahan		Penculikan		Eksplorasi seksual
Dan atau	Dan	Atau	Dan	Atau
Penampungan		Penipuan		Kerja Paksa
Dan atau		Atau		Atau
Penerimaan		Kecurangan		Perbudakan
		Atau		Atau
		Kebohongan		Praktik serupa perbudakan
		Atau		
		Penyalahgunaan kekuasaan		

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Perdagangan Manusia**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan<sup>8</sup>:

- a. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang.

- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- f. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- g. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- h. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- i. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- j. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- k. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- l. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang di bebaskan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- m. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- n. Penjeraan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa

menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang di tafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelahaan yang di dasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

a. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrat kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikrat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikrat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, pengertian secara



teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:<sup>10 3</sup>

- a. Donald Cressey : Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.
- b. Michael O. P. Dunbar  
Memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya di batasi pada pelacuran paksa.<sup>11</sup>
- c. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan

---

<sup>10 3</sup>Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.20

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 21

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak di inginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.<sup>12</sup>

- d. Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah :
  - a) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 22

- b) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a).
- d) Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.
- e) Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.<sup>136</sup>

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana di kutip dari *Wijers dan Lap- Chew* yaitu: Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 23

berkedok pernikahan (*servile marriage*).<sup>14</sup>

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang di perkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

1. Dari Perekrutan menjadi Eksploitasi

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini

---

<sup>14</sup> Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 10.28 WIB.

membahas proses perekrutan yang di lakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.<sup>15</sup>

## 2. Dari Pemaksaan Menjadi Dengan atau Tanpa Persetujuan.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

## 3. Dari Prostitusi Menjadi Perburuan yang Informal dan Tidak Diatur Hukum.

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai perdagangan perempuan dan anak yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan di definisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”.

---

<sup>15</sup> Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 10.28 WIB.

#### 4. Dari Kekerasan Terhadap Perempuan Menjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

#### 5. Dari Perdagangan Perempuan menjadi Migrasi Ilegal

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara- negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan di mana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.<sup>16</sup>

Dari definisi-defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 10.28 WIB.

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

## **B. Sanksi Hukum Perdagangan Orang**

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> 10Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan di penuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata untuk tujuan sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Dalam UUPTPO, tindak pidana perdagangan orang di pahami sebagai Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPO merincikan bahwa, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan



paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus di jadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni: Pertama, Unsur pelaku yang mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO di pahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO). Kedua, Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau di desain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Ketiga, Unsur cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang di lakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Keempat, Unsur TUJUAN Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.<sup>19</sup>

**a). Pembuktian dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam penegakan hukum berkaitan tindak pidana perdagangan orang, mutlak diperlukan pembuktian. Secara teoritis, dikenal 4 (empat) macam sistem pembuktian dalam perkara pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Pertama, *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim *an sich* dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Kedua, *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

pembuktian ini harus di dasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama. Ketiga, *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih di kenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah di tentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Keempat, *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih di kenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah di tentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>20</sup>

Pada konteks Indonesia, sistem pembuktian yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya sebagai berikut<sup>21</sup> :  
*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."*

Dari rumusan Pasal 183 KUHP ini, terlihat bahwa

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia – Edisi Ke 7, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 141.

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

pembuktian harus di dasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, di sertai dengan keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama *sistem negative wettelijk*.

Untuk menunjang pembuktian dalam suatu peristiwa pidana, maka harus di lakukan Penyidikan/Investigasi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana/tindak pidana perdagangan orang yang terjadi. Dalam kerja-kerja Penyidikan/Investigasi, penyidik/investigator harus menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, yakni: Pertama, fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan. Kedua, identitas dari pada sikorban. Ketiga, tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan. Keempat, bagaimana kejahatan itu dilakukan. Kelima, waktu terjadinya kejahatan. Keenam, apa yang menjadi motif, tujuan serta niat. Ketujuh, identitas pelaku kejahatan.

Dalam melakukan Penyidikan/Investigasi, untuk suatu tindak

pidana perdagangan orang, parameter yang harus di pakai adalah parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 29 UUPTPO yang di kaitkan dengan segi tiga pembuktian atau *evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi. Segi tiga pembuktian atau *evidence triangle* merupakan segitiga yang terbentuk akibat hubungan timbal balik (*interrelasi*) antara: Pertama, KORBAN adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 3 UUPTPO). Kedua, pelaku adalah Setiap orang yang dalam UUPTPO di pahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).<sup>22</sup> Ketiga, alat bukti. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti/barang bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah di lakukan Pelaku/terdakwa.<sup>23</sup>

#### **b). Pelaku dan Sanksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPTPO, pelaku adalah setiap

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>23</sup> Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 135.

orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, UUPTPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu: Pertama, agen perekrutan tenaga kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/caloe (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan.<sup>24</sup>

Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. Kedua, agen/caloe (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. Ketiga, majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja

---

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). Kelima, pemilik/pengeloar rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Terhadap para pelaku ini, UUPTPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000-600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000 - Rp. 5.000.000.000.<sup>25</sup>

Selain itu, pasal 9 UUPTPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp. 40.000.000 - Rp. 240.000.000.

Dalam penegakan hukum kasus perdagangan orang, uraian tentang pelaku sebagaimana yang terdapat dalam pasal 9 UUPTPO

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu:<sup>26</sup>

### ***I. Pembuat atau Dader***

Pembuat atau *dader* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan.<sup>27</sup> Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim di katakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau *dader* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri dari:

a) Pelaku (*pleger*).

Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 55 dan 56.

<sup>27</sup> P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 585.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 599.



b) Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*).

Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijjke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctorphysicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*.<sup>29</sup> Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang di maksudkan di dalam Pasal 55 ayat

(1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Simons dalam P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut adalah: Pertama, apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Kedua, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalah pahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*). Ketiga, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 610-611.

ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah di syartakan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. Keempat, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut tidak di syartakan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana. Kelima, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan. Keenam, apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut di berikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu. Ketujuh, apabila orang yang di suruh melakukan suatu itndak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu seperti yang telah di syartakan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus di miliki oleh pelakunya sendiri.

c) Yang turut serta (*medepleger*).

Adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

d) Penganjur (*uitlokker*).

Adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk

melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.<sup>30</sup>

## **2 Pembantu atau *medeplichtige***

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>31</sup>

### **a. Pembantuan pada saat kejahatan di lakukan.**

Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan di lakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada: Pertama, pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. Kedua, pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa di isyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri. Ketiga, pembantuan dalam pelanggaran tidak di pidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap di pidana. Keempat, maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan di kurangi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), sedangkan turut serta di pidana sama.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 610-611.

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56.

b. Pembantuan sebelum kejahatan di lakukan, yang di lakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil di timbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggung jawaban pembuat yang semuanya di pidana sama dengan pelaku, pembantu di pidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu di kurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang di lakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan di ancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu di pidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan pengecualian: pertama, pembantu di pidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana: (a). Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. (b). Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415 KUHP).

(c). Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP). Kedua, Pembantu di pidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana: (a). Membantu menyembunyikan barang

titipan hakim (Pasal 231 ayat (3) KUHP). (b). Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).<sup>32</sup>

### **C. Perdagangan Orang Menurut Perspektif Hukum Islam**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) di dalam sejarah kajian Islam lebih di kenal dengan kisah/cerita perbudakan yang terjadi di wilayah jazirah arabiah. Namun sejak kapan terjadi praktek perbudakan ini tidak ada yang tahu secara pasti. Karena jauh sebelum nabi Muhammad saw di lahirkan, praktek perbudakan telah terjadi bahkan pada masa nabi Ya‘qub as, orang yang terbukti mencuri di serahkan kembali kepada orang yang di curi hartanya untuk kemudian di jadikan budaknya.

Bukti lain adanya perbudakan juga di ceritakan pada masa nabi Ibrahim as, Sarah isteri tercinta, memberikan budaknya, Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim as yang kemudian memberikan keturunan yaitu Nabi Ismail as. Ketika Muhammad saw di angkat menjadi Nabi oleh Allah tugas utamanya adalah memperbaiki akhlaq kaum Quraisy saat itu, sehingga spirit membebaskan manusia dari praktek perbudakan merupakan salah satu dari upaya memperbaiki akhlaq kaumnya. Islam mengajarkan, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling istimewa, paling sempurna tidak hanya sempurna secara fisik namun juga di lengkapi dengan akal dan kemampuan

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 .

lainnya.<sup>33</sup>

Faktor terjadinya praktek perbudakan karena di dukung oleh situasi sosial politik saat itu. Struktur sosial masyarakat saat itu sangat patriarkhi, sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat di hormati dan di segani di wilayah Jazirah Arab. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidak berdayaan membayar hutang. Di tambah lagi dengan adanya pasar budak tempat dimana para tuan memperjual belikan budaknya. Praktek ini terjadi selama beratus-ratus tahun sampai akhirnya Islam datang dan menghapus praktek perbudakan ini, namun di lakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Misalnya dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika seorang muslim melakukan pelanggaran sebuah hukum agama.

Alasan Islam menghapus praktek perbudakan di karenakan perilaku tuan kepada para budak sangat diskriminatif, di samping bisa di perjual belikan, budak di pekerjaan secara paksa tanpa imbalan/upah, tidak memiliki waktu untuk mengurus diri sendiri, hidupnya hanya untuk melayani sang tuan, bahkan untuk budak perempuan para majikan memiliki hak seksualitas atasnya, namun ketika terjadi kehamilan dan melahirkan seorang bayi, bayi tersebut

---

<sup>33</sup>Informasi Media, Majalah Al-Hikmah, hal. 16, Edisi 4.

statusnya bayi merdeka (di nisbatkan kepada bapaknya). Sedangkan untuk budak perempuan ibu dari bayi tersebut selamanya tetaplah menjadi budak.

#### **a). Perbedaan Perbudakan Pada Zaman Nabi dan Zaman Sekarang**

Perbedaan perbudakan pada zaman nabi dan pada zaman sekarang tidak ada bedanya, atau boleh di bilang perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah praktek perbudakan masa kini. Yang membedakan hanyalah waktu dan tempat, di karenakan perkembangan peradaban umat manusia, dan ini terkait dengan ragamnya modus yang terjadi, di tambah faktor perkembangan teknologi yang berdampak pada globalisasi dunia, korban perbudakan dan *trafficking* keduanya, sama-sama tereksplorasi hak-haknya, di ambil kemanfaatan dari diri nya yang membedakan adalah ruang dan waktu. Jikalau dulu hanya terjadi dalam lingkup kecil, dalam satu suku, atau antar suku namun sekarang yang terjadi lintas daerah bahkan lintas negara.

Pada dasarnya hukum perdagangan itu mubah dan syah bila terjadi suka sama suka di kedua belah pihak yang bertransaksi. Artinya dalam aktifitas ini tidak ada yang dirugikan, baik melalui tipu muslihat (*ghoror*) mau pun melalui tekanan (kekerasan). Dalam konteks perdagangan manusia saat ini (*human trafficking*), obyek yang diperdagangkan adalah manusia, lebih tepatnya manusia merdeka

(bukan budak). Dalam QS. Al-Isro“ ayat 70 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan , Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>34</sup>

Dalam ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menjamin rezeki setiap manusia, di lebihkan dari makhluk yang lain, ini bisa di artikan di jamin kemerdekaan, tidak bisa di perjual belikan seperti halnya makhluk lain. Lalu bagaimana hukum menjual manusia ? Ulama bersepakat hukumnya haram, karena kegiatan jual beli manusia ini, merendahkan martabat manusia, menyamakannya dengan barang, menjadikannya obyek dengan menafikan hak-haknya dan pelakunya berdosa.

Manusia meskipun dia adalah anak-anak namun tetap mempunyai hak memiliki dan tidak di miliki apalagi diperjual belikan. Ulama bersepakat, bahkan tidak menepati upah seseorang atau menunda upah seseorang adalah sama dengan memperdagangkan manusia. Karena yang terjadi dalam *trafficking* adalah para makelar tenaga kerja atau PTKIS yang memakan upah / gaji TKI padahal itu haknya atas pekerjaannya atau menipunya dengan membayar gaji tidak sesuai dengan kontrak kerja bahkan

---

<sup>34</sup> Kitab Suci Al-Qur“an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa“, 1992), hal. 435



kerap kali pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kontrak kerja dengan menjerumuskan pekerja perempuan menjadi komoditi seks atau prostitusi. Dari uraian diatas jelas praktek-praktek perdagangan manusia hukumnya haram tidak ada kebaikan di dalamnya.

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang di muliakan, sehingga Anak adam ini di bekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak di miliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat di jadikan sebagai barang yang dapat di miliki atau di perjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.

Dewasa ini kita dapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *Human Trafficking*, terutama pada wanita untuk perzinaan atau di pekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru di lahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku (*'urf*), kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut bersetatus *Hur* (merdeka).

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad- abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu di mulai. Sebagian

ahli sejarah berpendapat, bahwa perbudakan itu di mulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebagian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain dan terjadilah perbudakan manusia atas manusia dan perdagangan manusia (*trafficking*).

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa yang lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah SWT. Karena itulah Islam berusaha untuk membebaskan manusia dari perbudakan di bumi ini, sebab perbudakan itu melahirkan kesengsaraan bagi para *dhu'afa* (orang-orang lemah atau para kaum miskin).

Di bawah ini di kutipkan beberapa arti ayat yang ada hubungannya dengan persamaan manusia, perbudakan dan pembebasannya:

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Mengenal.<sup>35</sup>

Artinya: Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu melepaskan budak dari perbudakan).<sup>36</sup>

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>37</sup>

**b). Pandangan fiqh tentang perdagangan manusia**

Hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 847.

<sup>36</sup> Ibid, hal. 1061-1062.

<sup>37</sup> Ibid, hal. 135-136.

yang di haramkan dengan *nash* atau disebabkan *Ghoror* (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*'abd /amah*). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan pada manusia merdeka saja. Yang mana hal ini akan kami ambilkan dari Al Qur'an dan sunah serta beberapa pandangan ahli fiqh dari berbagai madzhab tentang masalah ini.

Kembali lagi pada ayat Al-Qur'an di atas pada surat Al-Isra' ayat 70, sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah, bahwa kemuliaan manusia yang Allah ta'ala berikan kepada mereka yaitu dengan di khususkannya beberapa nikmat yang tidak di berikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan untuk manusia, kemudian dengannya mendapatkan *taklif syari'ah* seperti yang telah di jelaskan oleh mufasssirin dalam penafsiran ayat tersebut diatas, maka hal tersebut mengharuskan bahwa manusia tidak di rendahkan dengan cara di samakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat di jual belikan.

Dalam sebuah hadits Qudsi di sebutkan bahwa Allah SWT mengancam keras pebisnis manusia merdeka ini denga ancaman permusuhan dihari kiamat, di riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah Radhiallahu ,,anhu dari Nabi Salallahu alaihi wa salam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: "Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka dihari Qiamat; seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak

menepatinya, dan seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan tetapi tidak membayar upahnya”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksplanatoris. Sebagaimana dijelaskan di bagian atas, fokus penelitian ini adalah menyangkut tiga hal, yakni mengenai kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa perdagangan anak di provinsi Sumatera Utara; praktek pemerintah dalam penanganan pemberantasan, pencegahan, dan penanggulangan atas kejahatan perdagangan anak, khususnya di provinsi Sumatera Utara; serta peran serta dan keterlibatan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam pemberantasan, penanggulangan dan penanganan kejahatan perdagangan anak di provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Sumatera Utara provinsi yang selama ini dikenal menonjol sebagai daerah asal, lokasi transaksi, tempat transit, dan/atau daerah tujuan perdagangan anak di Indonesia. Waktu melihat obyek penelitian ini adalah tahun 2019 dimana tahun 2020 masih berjalan, yakni sejak akan dilakukannya perubahan atau revisi pada peraturan daerah provinsi Sumatera Utara Nomor.6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

### **C. Subjek Penelitian**

Di dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah anak yang menjadi korban trafficking, orang tua/keluarga korban perdagangan anak, aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), pejabat instansi pemerintah terkait, dan LSM yang bekerja dalam isu perdagangan anak. Sedangkan obyek yang akan diteliti adalah praktik perdagangan anak di provinsi Sumatera Utara selama tahun 2019.

### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Di tahap awal, dilakukan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumenter, yakni melalui buku, laporan, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan investigasi jurnalistik, kajian akademis, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan pengumpulan data primer melalui teknik wawancara mendalam. Teknik penggalian data primer berupa wawancara semi-terstruktur ini akan dilakukan terhadap subyek penelitian yakni stakeholder perdagangan anak, orang tua/keluarga dari anak korban perdagangan dan migrasi, aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), para pengambil kebijakan ditingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota, dan LSM yang melakukan advokasi terhadap persoalan perdagangan anak. Wawancara ini juga akan dilakukan terhadap akademisi dan anggota legislatif yang dianggap memahami masalah tersebut.

### **E. Teknik Analisa Data**

Analisis data menggunakan deskripsi eksplanatoris dan interpretatif. Akhirnya, seluruh data tersebut berikut hasil analisisnya akan disusun dan disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat sistematis untuk selanjutnya dipublikasikan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. Keseluruhan laporan akan dipakai sebagai basis bagi penyusunan laporan penelitian Fenomena Perdagangan Anak di provinsi Sumatera Utara.



## **BAB IV**

# **TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

### **A. Gambaran Umum Propinsi Sumatera Utara**

#### **1.1. Kondisi Geografis Wilayah**

Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 1°-4 ° Lintang Utara dan 98 °-100 ° Bujur Timur. Adapun luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 Km<sup>2</sup> atau 3,72% dari luas wilayah RI, dengan jumlah pulau sebanyak 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Sumatera.

Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Naggroe Aceh Darussalam di sebelah utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur. Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

## 1.2. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

Seiring dengan laju perkembangan pemekaran wilayah Kabupaten / Kota di wilayah Sumatera Utara yang begitu pesat, sampai tahun 2011 jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah bertambah jumlahnya menjadi 33 Kabupaten / Kota yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 421 Kecamatan, Desa 5.175 dan Desa 653 dengan Ibukota Provinsinya di kota Medan dengan luas 265,10 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 2.117.224 jiwa.

**Tabel 1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi**  
**Provinsi Sumatera Utara**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH</b>		
	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>KELURAHAN</b>
1. Nias	9	119	-
2. Mandailing Natal	23	381	27
3. Tapanuli Selatan	14	212	36

4. Tapanuli Tengah	20	147	30
5. Tapanuli Utara	15	241	11
6. Toba Samosir	16	231	13
7. Labuhan Batu	9	75	23
8. Asahan	25	177	27
9. Simalungun	31	345	22
10. Dairi	15	161	8
11. Karo	17	259	10
12. Deli Serdang	22	385	9
13. Langkat	23	240	37
14. Nias Selatan	18	354	2
15. Humbang Hasundutan	10	153	1
16. Pakpak Bharat	8	52	-
17. Samosir	9	128	6
18. Serdang Bedagai	17	237	6
19. Batubara	7	93	7
20. Padang Lawas Utara	9	386	2
21. Padang Lawas	11	303	1
22. Labuhan Batu Selatan	5	52	2
23. Labuhan Batu Utara	8	82	8
24. Nias Utara	11	112	1

25. Nias Barat	8	110	-
26. Sibolga	4	-	17
27. Tanjung Balai	6	-	31
28. Pematang Siantar	8	-	53
29. Tebing Tinggi	5	-	35
30. Medan	21	-	151
31. Binjai	5	-	37
32. Padang Sidempuan	6	42	37
33. Gunung Sitoli	6	98	3
Sumatera Utara	421	5.175	653

*Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2018*

### **1.3. Jumlah Penduduk**

Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di luar Pulau Jawa dan peringkat ke-empat perhitungan secara nasional setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk tahun 1990 penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,26 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 11,51 juta jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000. Selanjutnya, berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah naik menjadi 12.982.204 jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk Sumut mencapai 13.028.663 jiwa<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> BPS Sumut, 2019

Pada tahun 2011, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 13.103.596 jiwa, terdiri dari 6.544.092 laki-laki dan 6.559.504 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 181 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Sekitar 50,84 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 49,16 % bertempat tinggal di daerah perkotaan, angka ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 2008 dimana penduduk yang tinggal di Desa mencapai 54,77% dan di perkotaan sebesar 45,70%,

Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 1990 sampai dengan 2000 adalah 1,20 persen per tahun, dan pada tahun 2000 sampai dengan 2010 menjadi 1,22 persen per tahun. Pada tahun 2014 penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.766.581 jiwa yang terdiri dari 6.868.587 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 6.898.264 jiwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Secara statistik ratio jenis kelamin (sex ratio) terbaca sebagai 99,57.

Penduduk Sumatera Utara berdasarkan kelompok usia 0-19 dan jenis kelamin tahun 2014 adalah sebagai berikut, laki-laki berjumlah 2.939.336 jiwa, perempuan berjumlah 2.818.147 jiwa, dan secara total berjumlah 5.757.483 jiwa. Sementara jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2015 adalah 13.937.797.000 dengan kelompok usia 0-19 tahun berjumlah 5.790.627; 2.956.472 laki-laki dan 2.834.155 perempuan.

#### **1.4. Pendidikan**

Tetap berada dalam dunia pendidikan (bersekolah) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mencegah anak dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri dan masa depannya. Anak yang tidak bersekolah lebih mudah ditarik atau pun tertarik pada dunia kerja atau dunia orang dewasa. Kegiatan belajar di sekolah menempatkan anak dalam suatu lingkungan yang relatif aman dan menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh negatif di masyarakat. (Irwanto dkk, Perdagangan Anak di Indonesia).

Pada tahun 2014, Penduduk Sumatera Utara yang masih sekolah menurut Kelompok Umur (dalam persentase) adalah sebagai berikut: kelompok umur 7-12 tahun sebanyak 9,35%, kelompok umur 13-15 berjumlah 96,06%, dan kelompok umur 16-18 tahun tercatat 75,78%.

### **1.5. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang tak kunjung selesai di Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Profil Kemiskinan di Sumatera Utara 2015) pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2015 sebanyak 1.463.670 orang (10,53%), angka ini bertambah sebanyak 103.070 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin September 2014 yang berjumlah 1.360.600 orang (9,85%).

Selama periode September 2014 - Maret 2015, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 71.240 orang (dari 693.130

orang pada September 2014 menjadi 764.370 orang pada Maret 2015), sedangkan di daerah perkotaan bertambah 31.830 orang (dari 667.470 orang pada September 2014 menjadi 699.300 orang pada Maret 2015).

Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 10,16 persen, naik dibanding September 2014 yang sebesar 9,81 persen. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 9,89 persen pada September 2014 naik menjadi 10,89 persen pada Maret 2015.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, pada Maret 2015 meskipun persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berada di bawah persentase penduduk miskin Indonesia, akan tetapi penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi dan menempati peringkat ke-17 dari 34 Provinsi. Persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 11,13 persen dan Sumatera Utara adalah 10,5 persen.

## **B. Sekilas Sejarah Perdagangan Manusia di Sumatera Utara**

Menurut catatan sejarah, di zaman penjajahan Belanda, sebagian daerah Sumatera Utara sekarang masuk ke dalam wilayah administratif Sumatera Timur, yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Medan. Wilayah ini merupakan bagian dari Gouvernement van Sumatra, yang meliputi seluruh Sumatera, dikepalai oleh seorang Gouverneur yang juga berkedudukan di Medan. Membuka sejarah Sumatera Timur artinya adalah menelaah soal perkebunan tembakau dengan hikayat kuli kontraknya. Tembakau Deli pada waktu itu sangat terkenal sebagai salah satu tembakau dengan kualitas terbaik di dunia sehingga permintaan pasar (terutama Eropa) akan tembakau dari daerah ini sangatlah tinggi.

Untuk kepentingan meningkatkan produksi, guna memenuhi permintaan pasar, kebun-kebun tembakau yang pada waktu itu tumbuh subur di Deli, mendatangkan beribu-ribu buruh dari Jawa, Cina, dan India. Dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan yang gampang dengan gaji yang tinggi—bahkan dilukiskan bahwa di Deli tumbuh pohon berdaun uang dimana yang jatuh ke tanah boleh menjadi hak pekerja, sedang yang masih dipohon adalah hak perkebunan—, mereka direkrut oleh agen-agen tenaga kerja yang bekerjasama dengan pemerintahan setingkat desa untuk diberangkatkan ke Sumatera Timur. Sesampainya di sana dipekerjakan sebagai pekerja kasar dan diperlakukan layaknya budak dengan gaji yang kecil. (lihat



misalnya: Jan Breman: Menjinakkan Sang Kuli dan Moh. Said: Koeli Kontrak Tempo Doeloe, Emil W Aulia: berjuta-juta di Deli)

Tan Malaka, yang pernah menetap beberapa waktu di Sumatera Timur, dalam memoirnya Dari Penjara ke Penjara jilid I sebagaimana dikutip Harry A. Poeze, menggambarkan keadaan tersebut sebagai:

”Inilah kelas yang memeras keringat dari pagi sampai malam; kelas yang diberi gaji hanya cukup untuk mengisi perutnya; kelas yang tinggal di gubuk seperti kambing di kandang; yang setiap saat bisa dipukul atau dimaki-maki dengan *godverdomme*; kelas yang setiap saat harus melepaskan isteri atau anak perempuan kalau ada seorang kulit putih yang menyukainya.... Inilah kelas orang Indonesia yang dikenal sebagai kuli kontrak. Kuli-kuli perkebunan biasanya harus bangun pukul 4 pagi, karena tempat pekerjaan mereka jauh letaknya. Baru pukul 7 atau 8 malam boleh pulang. Bayarannya menurut kontrak berjumlah empat puluh sen setiap hari. Makanannya biasanya tidak cukup untuk melakukan pekerjaan yang berat selama 8 sampai 12 jam setiap hari di bawah terik panas matahari. Pakaian mereka cepat menjadi compang-camping karena sering bekerja di hutan. Karena kekurangan dalam segala-galanya, timbullah di dalam diri mereka suatu nafsu yang tidak terkendalikan untuk mencari nasib baik dengan bermain judi; suatu nafsu yang dengan sengaja dikobarkan oleh perusahaan setelah dilakukan pembayaran. Mereka yang kalah—dan biasayanya lebih banyak orang yang kalah daripada

yang menang—boleh pinjam uang dari perusahaan. Karena utang ini, maka sembilan puluh persen dari kuli-kuli itu setelah habisnya kontrak terpaksa memperbaharui kontraknya kembali. Utang itu menimbulkan nafsu untuk berjudi dan perjudian itu memperbesar utang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.”<sup>39</sup>

Kuli selalu dihantui oleh *Poenale Sangtie*, yakni suatu ketentuan yang menjadi bagian dari kuli ordonansi tahun 1880 yang mengikat kuli dalam kontrak. Isinya ialah bahwa setiap kuli yang meninggalkan pekerjaannya dan mengabaikan kewajiban kerjanya bisa didenda atau dihukum penjara, bahkan pihak perkebunan menerapkan hukuman-hukuman yang tak manusiawi: diseret kuda dengan tangan terikat, dipukuli dengan daun jelatang kemudian disiram air, ditusuk di bagian kukunya dengan serpihan bambu, atau bahkan digosok alat vitalnya dengan merica halus—untuk kuli perempuan (*Jan Breman: Menjinakkan Sang Kuli*)

Sisa-sisa kuli kontrak ini masih berbekas sampai saat ini dan menjadi ingatan kolektif orang-orang Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk Sumatera Utara yang bersuku Jawa saat ini adalah merupakan keturunan dari leluhur mereka yang dulu bermigrasi ke Sumatera karena sistem kuli kontrak, dan sehabis masa kontrak tidak kembali lagi ke Jawa, tapi memulai hidup baru di Sumatera Utara. Istilah “Jawa Kontrak” atau “Jakon” masih sering terdengar untuk menyebutkan orang-orang Jawa yang tinggal di Sumatera Utara. Jika

---

<sup>39</sup> Harry A. Poeze: *Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik 1897-1925*, hal.109

dilihat dengan kaca mata hukum sekarang, maka apa yang terjadi di Sumatera Timur waktu itu adalah perdagangan orang (trafiking), walaupun khusus untuk perdagangan anak belum ditemukan data yang jelas apakah di antara kuli kontrak tersebut terdapat seseorang yang berusia anak.

### **C. Situasi Perdagangan Anak di Sumatera Utara**

#### **a. Besaran Kasus**

Sangat sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya besaran pasti korban perdagangan anak yang di Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga—baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil—mengeluarkan data yang berbeda, dan belum bisa terverifikasi antara data satu lembaga dengan lembaga lainnya. Situasi ini disebabkan:

Pertama, Masih belum satu persepsi di antara lembaga dalam mendokumentasikan kasus atau korban, dimana sebagian lembaga mendokumentasikan kejadian berdasarkan kasus bukan berdasarkan korban, sementara sebagian lembaga mendokumentasikan kejadian berdasarkan korban. Diketahui bahwa satu kasus dapat terdiri dari beberapa korban. Kedua, Data satu korban atau kasus yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga sangat besar kemungkinannya adalah korban atau kasus yang sama yang dikeluarkan oleh lembaga yang lain, karena memang satu kasus atau korban ditangani oleh beberapa lembaga secara bersamaan. Ketiga, data dasar atau data

layanan korban banyak yang tidak didokumentasikan dengan berbagai macam alasan, padahal verifikasi korban dapat dilakukan jika di dapat dasar kasus atau korban di masing-masing lembaga. Keempat, Data korban perdagangan manusia di beberapa lembaga tidak dipisahkan antara data perdagangan perempuan dewasa dengan data perdagangan anak. Dengan demikian data kasus atau korban perdagangan anak yang diperoleh dari tiap lembaga yang terkait dengan perdagangan dan migrasi anak tidak dapat dijumlahkan, karena besar kemungkinan ada pengulangan data yang sama (*redundant*).

Sebagai Gambaran, berikut dideskripsikan data perdagangan anak yang dimiliki oleh masing-masing lembaga:

#### **a.1. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (DP3A) Provinsi Sumatera Utara, sebagai *leading sector* untuk koordinasi, mempunyai mandat salah satunya mengumpulkan dan mengkonsolidasi data perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara setiap tahunnya dan kemudian dilaporkan ke Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data yang dikumpulkan oleh DP3A diperoleh dari Kepolisian, organisasi masyarakat sipil, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Daerah (PKPA), dan kasus-kasus yang ditangani langsung oleh DP3A.

Tabel 2:

Data Korban Perdagangan Manusia di Propinsi Sumatera Utara

No	Lembaga	Jumlah Korban yang Ditangani	Keterangan
		2019	
1	DP3A	25 kasus	Data tahun 2019 merupakan kasus rujukan dari beberapa lembaga
2	Pusaka Indonesia	Tidak ada	2019 tidak mendapatkan kasus perdagangan anak dan perempuan
3	Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	17 kasus	Kasus yang ditangani sendiri dan bekerjasama dgn DP3A
4	Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP)	2 kasus	Kasus dirujuk pada DP3A

Sumber: Dokumentasi DP3A Propinsi Sumatera Utara, 2019

Data yang disajikan oleh DP3A ini bila diperhatikan tidak memisahkan antara korban trafiking anak dan korban trafiking perempuan. Data ini juga tidak memiliki detail data setiap korban, dimana yang dimiliki hanya data kumulatif. Namun demikian, data pada tabel di atas memperlihatkan kalau trend jumlah korban naik dan turun (fluktuatif). Kemudian data perdagangan anak dan perempuan tidak dipisahkan maka penanganannya akan mengalami kesulitan karena penanganan korban perempuan dan anak berbeda.

Perbedaan data tersebut juga menunjukkan bahwa tidak terjadi sinkronisasi dan koordinasi penanganan kasus perdagangan anak di provinsi Sumatera Utara. Ini juga akan menyebabkan kesulitan dalam penanganan korban.

## **b. Penyebab dan Bentuk eksploitasi Perdagangan Anak**

### **b.1. Penyebab Perdagangan Anak**

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004). Kemiskinan sendiri erat

kaitannya dengan kejahatan. Francis Fukuyama dalam bukunya *The Great Disruption* menyatakan bahwa kemiskinan merupakan penyumbang terbesar terjadinya guncangan sosial (*great disruption*) di berbagai negara.

Berdasarkan penggalan data yang dilakukan di Sumatera Utara, anak-anak terjerat menjadi korban kejahatan trafiking juga dilatarbelakangi salah satunya oleh kemiskinan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3A Sumatera Utara menyatakan bahwa rata-rata korban perdagangan anak berasal dari keluarga miskin, terlebih kalau korban yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang banyak menjadi korban trafiking di Sumatera Utara.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa LSM yang bekerja dalam isu perlindungan anak seperti KKSP, dan PKPA. Informan dari KKSP menyatakan bahwa korban berasal dari keluarga miskin berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh KKSP. Orang tua korban tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan beberapa dari mereka adalah buruh bangunan. Keadaan ini kemudian mendorong anak menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang, dan kemudian menjadi korban perdagangan manusia.

*“Kasus yang kami tangani korban berasal dari keluarga miskin di Tanjung Morawa. Ia masih bersekolah. Tapi karena kesulitan ekonomi, ia menerima tawaran dari seorang kawannya untuk bekerja di Riau. Korban lalu di bawah ke*

*Medan sebelum menuju Riau. Di Riau korban kemudian dipekerjakan sebagai pelayan kafe sekaligus ‘melayani’ tamu di sana” (Syamsul, Manajer Operasional KKSP).*

Namun demikian, tidak semua kasus perdagangan anak berlatar belakang kemiskinan, terlebih untuk korban yang berasal dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat. Informasi yang didapat dari DP3A menyatakan bahwa korban yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat tidaklah semua berasal dari keluarga miskin. Ini dibuktikan dengan, misalnya, keluarga korban mempunyai usaha ekonomi di daerah asalnya. Pihak keluarga korban juga tidak punya kesulitan keuangan ketika menjemput korban yang berada di Sumatera Utara. Situasi ini sangat berbeda dengan korban yang berasal dari NTT, karena keluarga sama sekali tidak memiliki uang untuk ongkos pulang korban.

Kemiskinan bukan lagi menjadi faktor tunggal penyebab anak terjerumus menjadi korban perdagangan anak. Faktor lain yang juga menentukan adalah persoalan gaya hidup, yakni ingin dapat hidup senang dengan cara yang mudah.

*“Apalagi kalau kita lihat dari cantik-cantiknya, kulitnya mulus-mulus, nampak mereka bukan dari keluarga miskin. Ini sepertinya ini sudah arena pergaulan atau gaya hidup. Pengaruh HP luar biasa. Ketika anak-anak umur 16-17 sudah*



*malas bersekolah, ia ingin mencoba mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang ia bisa main-main. Tidak pernah dibicarakan apakah itu pekerjaan menjadi pembantu (PRT), tapi pekerjaan yang ia bisa enak mengerjakannya dan mendapatkan uangnya cepat.” (Afini S.E, Kepala Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3A Provinsi Sumatera Utara)*

Informan di PKPA juga menyebutkan adanya pergeseran penyebab seorang anak menjadi korban trafiking. Pada awalnya terungkapnya, kasus trafiking lebih karena disebabkan persoalan ekonomi, tapi akhir-akhir ini lebih banyak disebabkan oleh faktor gaya hidup.

*“Penyebabnya kalau dulu yang dominan adalah faktor ekonomi, tetapi kemudian kita melihat ada pergeseran. Kalau kita melihat sekarang tentang masalah eksploitasi seksual dimana anak-anak terjebak dan dijadikan korban trafiking untuk tujuan seksual, faktornya bukan lagi soal ekonomi tetapi lebih pada gaya hidup dan kecanggihan teknologi, dan ada juga yang melatar belakangi adalah keluarga yang broken home dan orang tua yang tidak bisa mengawasi anak secara maksimal sehingga membuat anak terjerumus.” (Azmiati Lubis, PKPA)*

## **b.2. Bentuk eksploitasi anak yang diperdagangkan**

Eksplotasi yang dialami oleh anak korban trafficking di Sumatera Utara secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua jenis, yakni: eksploitasi seksual komersial anak dan eksploitasi ekonomi.

### **b.2.1. Eksploitasi Seksual Komersial**

Istilah eksploitasi seksual komersial umumnya mempergunakan istilah anak yang dilacurkan. Ini merupakan terjemahan dari *prostituted children*, yang digunakan sebagai pengganti istilah pelacur anak atau *child prostitutes*. Istilah ini diperkenalkan sejalan dengan berkembangnya kampanye internasional anti pelacuran anak dalam pariwisata Asia (ECPAT) yang dicanangkan tahun 1990. Istilah ini merujuk pada subyek—yakni anak-anak yang terlibat dalam prostitusi—dan sengaja dipilih untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis dimana seorang anak, berbeda dari orang dewasa, harus dianggap tidak punya kemampuan untuk memilih prostitusi sebagai profesi. Dengan demikian, istilah ini menegaskan posisi anak sebagai korban, bukan pelaku; sekaligus menegaskan bahwa tindakan menjerumuskan anak kedalam pelacuran merupakan suatu kejahatan (Moh. Farid, *Situasi dan Kondisi Anak yang Dilacurkan di Indonesia*)

Berdasarkan penggalan data yang dilakukan di instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang ada di Sumatera Utara didapatkan fakta bahwa beberapa kasus perdagangan anak yang

mereka tangani adalah untuk tujuan eksploitasi seksual, dimana anak dilacurkan. Mereka biasanya bekerja di kafe-kafe, tempat karaoke, dan tempat hiburan (Pub). Untuk kasus anak yang menjadi korban di Malaysia, ada sekitar 40 anak yang bekerja untuk tujuan seksual dan untuk tujuan Pembantu Rumah Tangga (PRT). Rentang usia anak yang dieksploitasi seksual adalah sekitar 14-18 tahun, sementara untuk PRT usianya 30 tahun ke bawah. Kalau anak korban perdagangan untuk tujuan seksual mereka lintas negara umumnya diberangkatkan dengan pesawat dan pasportnya semua sudah dipalsukan. Anak yang dilacurkan ini sebagian mendapatkan imbalan dalam bentuk uang, namun sebagian yang lain hanya mendapat imbalan barang kebutuhan korban. Sebagai tambahan, seorang anak yang menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual kemudian dapat menjadi pelaku yang merekrut teman sebayanya untuk menjadi korban.

*“Dalam konteks anak yang dipekerjakan untuk tujuan seksual, bentuk eksploitasinya lebih pada barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga uang. Kalau dari segi uang sangat miris melihatnya, hanya dengan 200 ribu saja dia mau menjual temannya, ada juga dimana anak sudah tergantung terhadap kebutuhan seksual, aka akan tetap mau melakukan walau tanpa bayaran”, (Wawancara dengan Azmiati Lubis, PKPA)*

## **b.2.2. Eksploitasi Ekonomi**

### **1. Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA)**

Menurut informan dari DP3A, PKPA, dan KKSP, untuk kasus menjadi pembantu rumah tangga korban yang ditemukan kebanyakan berasal dari NTT. Menjadi pembantu rumah tangga adalah pekerjaan termudah yang bisa diperoleh oleh seorang anak yang tidak mempunyai pengalaman kerja dan keahlian kerja serta pendidikan yang cukup. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya korban trafiking anak dijadikan pembantu rumah tangga. Masalahnya tidak saja ketika gaji anak tidak dibayar, jam kerja yang panjang, dan bekerja double—tidak hanya jadi pembantu rumah tangga tapi juga mengerjakan pekerjaan yang lain, namun juga anak-anak ini sama sekali tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan hak lainnya yang seharusnya di dapat oleh seorang anak.

Untuk PRT antar negara, biasanya korban diberangkatkan melalui Tanjung Balai dan Belawan dan kemudian diberangkatkan pakai Boat ke Malaysia. Ketika bekerja di sana mereka tidak mendapat gaji bahkan ada yang disiksa. Untuk yang dewasa biasanya mereka memakai pasport pelancong dan kemudian bekerja. Dengan kondisi bekerja sebagai pekerja illegal maka para pekerja wanita ini rentan menjadi korban. *Pada beberapa kasus, awalnya korban bekerja secara illegal di Malaysia, ketika korban dipulangkan melalui pelabuhan di Riau korban kemudian ditipu dan dipekerjaan*

*kembali di Malaysia untuk tujuan seksual* (wawancara dengan Azmiati Lubis, PKPA).

## **2. Pekerja Sarang Walet**

Salah satu bentuk eksploitasi ekonomi perdagangan anak yang terjadi adalah anak dipekerjakan di perusahaan sarang walet. Kasus ini terbongkar pada tahun 2014 lalu, berawal dari kematian seorang korban bernama Mirna Maun yang mayatnya dipulangkan ke daerah asalnya NTT. Mayatnya penuh luka. Keluarganya yang mencurigai Mirna Maun mati dengan cara tidak wajar, lalu melaporkan ke polisi, dan akhirnya terungkaplah kasus trafiking ini.

Ternyata di perusahaan walet tersebut masih ada 18 orang perempuan dan 4 diantaranya masih berusia 16-17 tahun (anak). Mereka dipekerjakan layaknya budak; kepala dibotakin pada awal kerja, tidak diberi makan yang cukup, tinggal di tempat yang tak layak, dan gaji ditahan oleh majikan.

## **3. Pekerjaan Ganda**

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan bahwa rata-rata korban trafiking bekerja dengan beban pekerjaan ganda. Kasus korban trafiking yang bekerja di sarang walet misalnya, selain korban-korban bekerja di sarang walet, korban juga menjadi pembantu rumah tangga di rumah pelaku. Demikian juga halnya dengan korban yang dijadikan anak yang dilacurkan, selain

dilacurkan mereka juga biasanya menjadi pelayan kafe, karaoke, atau panti pijat. Korban-korban ini umumnya tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga atau masyarakat. Identitas apalagi alat komunikasi di tahan oleh majikan. Tempat mereka bekerja juga jauh dari pusat keramaian atau tertutup dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada korban.

*“Dijadikan Pekerja Rumah Tangga (PRT), bekerja rangkap (bekerja sebagai PRT dan di usaha sarang walet), dijadikan eska sekaligus bekerja di kafe. Jam kerja yang panjang dan tidak ada jam istirahat”*  
(Afini SE, DP3A)

### **C. Peta wilayah sumber asal anak yang diperdagangkan dan rute tujuan**

Di bawah ini dideskripsikan peta sumber dan tujuan anak yang diperdagangkan ke dan dari propinsi Sumatera Utara.



Gambar 1: Peta Perdagangan Anak di Sumatera Utara

### **C.1. Daerah Asal**

Propinsi Sumatera Utara selain sebagai daerah asal (sending area) juga menjadi daerah transit (transit area) dan tujuan (destination area) kejahatan trafiking. Ini disebabkan selain karena persoalan-persoalan sosial yang masih terjadi di Sumatera Utara seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, wilayah sumatera sendiri berada di posisi yang geografis yang strategis. Cukup hanya dengan hitungan jam saja, dengan menggunakan moda udara atau laut, seseorang sudah bisa berpindah ke negara lain: Malaysia atau Singapura. Dengan hitungan jam pula orang bisa berpindah ke Batam, kota Industri yang jadi magnet tiap orang untuk mendatangi karena terbukanya peluang bekerja di sana.

Berdasarkan penggalan data yang dilakukan terhadap informan yang ada di pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa sebagai daerah asal kejahatan trafiking berada di wilayah Medan (khususnya pinggiran Kota), Deli Serdang (terutama Kecamatan Percut Sei Tuan dan Tanjung Morawa), Serdang Bedagai

Khususnya Dolok Masihul, Binjai, Batu Bara, Tanjung Balai, Tanah Karo, Langkat, Asahan dan Padang Sidempuan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari KKSP bahwa korban-korban yang mereka tangani berasal dari daerah pinggiran kota (sub-urban) seperti Tanjung Morawa dan Percut Sei Tuan (Deli Serdang).

*“Temuan kami, berdasarkan kasus yang kami tangani, korban berasal dari daerah sub-urban, Tanjung Morawa, di daerah ini walaupun masih berada di desa, tapi masyarakatnya saling tak mau peduli satu sama lain, layaknya masyarakat di perkotaan, sehingga kalau ada kejadian masyarakat seolah tidak peduli” (Syamsul, Manager Operasional KKSP)*

Untuk daerah asal korban yang di luar Sumatera Utara, berdasarkan kasus-kasus yang ditangani oleh DP3A, PKPA, dan Pusaka Indonesia, dan KKSP, korban berasal dari daerah Jawa Barat (Kota Depok, Sukabumi dan Kabupaten Indramayu), Jawa Tengah (Demak), Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu berdasarkan informasi dari PKPA, ditemukan kasus dimana anak korban perdagangan manusia berasal dari Palembang (Sumatera Selatan) dan Dumai (Riau).

## **C.2. Daerah Transit**

Kota Medan dan Tanjung Balai adalah dua tempat yang menjadi wilayah transit untuk kejahatan trafiking yang wilayah tujuannya adalah ke luar Sumatera Utara: Riau, Batam, Malaysia,



Singapura. Tempat transit dapat berupa rumah tempat penampungan Tenaga Kerja baik dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang legal, atau yang ijinnya sudah tidak diperpanjang. Ada juga calon korban yang ditransitkan di rumah-rumah pribadi. Dari Medan pelaku dengan mudah membawa atau mengirimkan korban ke wilayah tujuan seperti Malaysia atau Singapura melalui pesawat udara dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam, atau dibawa dengan Bus terlebih dahulu melalui belawan atau Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai melalui jalur laut pelaku kemudian membawa atau mengirim korban ke Malaysia.

*“Untuk wilayah tujuan Malaysia korban-korban yang berasal dari luar Medan biasanya dikumpulkan di Medan oleh agen yang ada di Medan, agen ini kemudian melakukan koordinasi dengan mucikari yang ada di Malaysia. Sedangkan untuk korban yang berasal dari Medan, korban ditransitkan di Tanjung Balai sebelum diberangkatkan ke Malaysia. (Informan PKPA).*

*“Kasus yang ditangani KKSP, korban yang berasal dari Tanjung Morawa (Deli Serdang, Sumatera Utara) ditransitkan terlebih dulu ke Medan. Di Medan, korban ditampung di sebuah kafe remang-remang. Beberapa hari di Medan, korban di bawa oleh pelaku menuju Riau. Di sana*

*korban dipekerjakan sebagai pelayan kafe sekaligus “melayani” tamu. (Informan KKSP).*

### **C.3. Wilayah Tujuan**

Wilayah tujuan trafiking untuk tujuan eksploitasi seksual di dalam Sumatera Utara adalah Medan, Bandar Baru (Deli Serdang), dan Bukit Maraja (Simalungun). Untuk daerah di luar Provinsi Sumatera Utara adalah Riau dan Batam, dan untuk tujuan ke luar negeri adalah ke Malaysia dan Singapura. Untuk Medan biasanya korban dipekerjakan di café hiburan malam dan karaoke untuk menjadi anak yang dilacurkan. Di Bandar Baru dan Bukit Maraja sendiri ada satu tempat lokalisasi dimana biasanya anak korban trafiking menjadi anak yang dilacurkan.

Sementara untuk perdagangan anak tujuan eksploitasi ekonomi, banyak di temukan kasus di Medan. Korban menjadi pembantu rumah tangga atau bekerja di perusahaan sarang walet. Tempat bekerja anak tertutup dari masyarakat sehingga tidak diketahui situasi eksploitasi yang terjadi.

### **D. Pola Pemindahan/Transportasi anak**

Kejahatan trafiking sebagaimana didefinisikan dalam UPTTPO adalah diawali dengan proses perekrutan yakni tindakan yang

meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Dari penggalian data yang dilakukan pada informan di DP3A, Kepolisian, Kejaksaan, Pusaka Indonesia, LBH-APIK, PKPA, dan KKSP proses perekrutan dilakukan oleh sponsor (agen) pencari tenaga kerja dan dari kawan ke kawan. Sponsor biasanya menawarkan pekerjaan di satu daerah dengan gaji yang besar dan kerja yang mudah.

*“Melalui kawan ke kawan, ada ditawarkan pekerjaan, katanya pekerjaan enak (direstoran), tapi ternyata restoran tersebut juga tempat prostitusi, dan si anak juga dipaksa menjadi eska”*  
(DP3A)

Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan bahwa perekrutan dilakukan dengan cara bujukan dan tipuan dengan menjanjikan pekerjaan di luar daerah ( dalam negeri).

*“Umumnya anak dibujuk, ditipu dijanjikan kerja diluar negeri atau daerah lain dengan gaji besar oleh pencari tenaga kerja”.*  
(Polda Sumut)

Kasus yang pernah ditangani oleh PKPA, dan P2TP2A menunjukkan bahwa korban yang berasal dari Sukabumi ditawarkan oleh tetangga pekerjaan di Medan sebagai kasir dengan gaji Rp. 1 juta per bulan,

namun sesampai di Medan korban dipekerjakan sebagai pelayan tamu (waitress) di sebuah kafe hiburan malam dengan gaji Rp.350 ribu per bulan.

*“Anak diiming-imingi kerja dengan gaji yang besar. Sebelum ke daerah tujuan diajak ke tempat penampungan tetapi anak tidak tahu bahwa penampungan ini merupakan jaringan sindikat perdagangan anak. Anak dipindahkan beberapa kali pindah sehingga mereka tidak tahu lagi jalan pulang baru dikirim ke daerah tujuan. Setiap anak bertanya siapa pemilik rumah persinggahan selalu dijawab milik teman yang akan membawa mereka. Dan kenapa harus berpindah-pindah jawabannya teman yang akan membawa mereka sedang pergi ke tempat yang satu lagi. Begitu seterusnya hingga ke daerah tujuan. Padahal tempat/rumah/hotel yang mereka datang hanya untuk mengaburkan jalan supaya anak tidak tahu lagi jalan pulang.”*  
(Dinas PPA dan KB Deli Serdang)

Pada awalnya pola rekrutmen, sebelum lahir UU PTPPO, pelaku masuk ke desa-desa terpencil melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk mempengaruhi anak atau ke Mal-Mal. Tetapi saat ini polanya sudah berbeda, mereka masuk melalui teman sebaya karena teman sebaya akan lebih mudah untuk menarik teman-temannya menjadi korban. Pelaku rekrutmen merekrut anak dengan mempengaruhi anak

melalui teman sebaya. jadi teman sebayaitu juga seperti jejaring dimana mereka berkomunikasi baik melalui perantara yakni teman di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Biasanya proses komunikasi ini dilakukan setelah pulang sekolah, dimana mereka mengajak anak/korban untuk bertemu dengan agen, dan mereka akan membuat janji untuk bertemu baik di Hotel maupun tempat-tempat yang lain. Dengan pola ini dapat dilihat bahwa pelakunya tetap orang dewasa, anak hanya sebagai perantara saja dalam melakukan perekrutan korban.

Korban perdagangan anak umumnya adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang jenis kerja, maupun tempat dimana mereka bekerja. Korban semata-mata hanya ingin merubah nasib menjadi lebih baik atau mendapatkan barang kebutuhannya dengan usaha sendiri. Korban juga seluruhnya tidak memiliki ketrampilan kerja, karena mereka masih pada usia sekolah. Situasi ketidak tahuan dan unskill ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk dimanipulasi dan mengelabui korban untuk direkrut. Setelah direkrut korban kemudian dengan mudah dieksploitasi.

*“Ada korban trafiking dijanjikan bekerja tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, korban tidak mendapatkan pelatihan, dan menurut PKPA sebenarnya korban tersebut tidak mendapat kelayakan untuk bekerja ke luar negeri , karena dia mempunyai keterbelakangan. sebenarnya ketika di telusuri dia mempunyai*

*tekanan karena dia mengalami KDRT sehingga dia mengajukan diri kepada orang yang mencari tenaga kerja tanpa jalur resmi. Korban diberangkatkan melalui Tanjung Balai. setelah sampai Malaysia korban ditampung kemudian dipekerjakan menjadi PRT, karena ia tidak mempunyai skill dan juga komunikasi yang tidak begitu lancar, akhirnya dia diusir oleh majikan dan paspornya ditahan oleh majikannya. Kemudian akhirnya dia ditemukan oleh orang Indonesia dan melaporkan ke KBRI. Pihak keluarga kemudian menemui agen yang memberangkatkan untuk segera memulangkan korban, tetapi agen banyak meminta duit ke keluarga tetapi korban juga tidak segera di pulangkan. Setelah itu keluarga meminta bantuan PKPA, kemudian kita segera koordinasikan ke BP3TKI untuk pemulangan korban dan Malaysia”. (Informan PKPA)*

## **E. Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Anak Oleh Pemerintah dan Masyarakat Sipil**

### **1. Peran Pemerintah**

#### **a. Pencegahan**

Dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan anak. Pemerintah provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanganan maupun pencegahan untuk tindak pidana perdagangan orang, Kebijakan yang

dibuat oleh Provinsi Sumatera Utara setelah keluarnya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak yang di keluarkan dalam Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002:

1. Tahun 2004 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat Perda No. 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, dimana Perda ini dilahirkan jauh sebelum undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di tetapkan. Dalam Peraturan Daerah ini, perdagangan perempuan dan anak sebagai : “Tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur- unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan, perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak”.
2. Pemerintah Sumatera Utara telah merumuskan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk periode 2005-2009 dan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 tahun 2005.
3. Pemerintah Sumatera Utara telah merumuskan Rencana Aksi Provinsi yang kedua tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan

Gubernur No. 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk jangka waktu 2010 – 2015. Sasaran dalam rencana aksi provinsi ini lebih menegaskan pada :

- a. Terlaksananya pencegahan segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan dan reintegrasi social yang memadai
- c. Terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban
- d. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- e. Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) perempuan dan anak
- f. Harmonisasi peraturan-peraturan local dengan standar kebijakan berkaitan dengan kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional, regional dan internasional
- g. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan data kasus-kasus perdagangan orang diwilayah Sumatera Utara secara periodik



- h. Adanya pusat pelayanan krisis untuk perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi social korban perdagangan orang
  - i. Terbangunnya kesadaran pejabat public dan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
  - j. Peningkatan kuantitas dan kualtaspusat pelayanan krisis untuk poerlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi social korban perdagangan orang di seluruh wilayah Sumatera Utara
  - k. Terbentuknya jaringan kerjasama (Networking) dalam kemitraan antara provinsi dengan pusat,kabupaten/kota dan juga kerjasama regional.
  - l. Pengalokasian anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam APBD setiap tahun untuk rehabilitasi, teintegrasi social, pencegahan dan implenetasi kebijakan pemeberantasan tindak pidana perdagangan orang
4. Pemerintah Sumatera Utara telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara. Gugus Tugas ini juga sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan

tindak pidana perdagangan orang. Gugus tugas yang dimaksud mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau peran dan tanggungjawab masing-masing
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi social
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
- e. Melaporkan dan melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kepada gubernur
- f. Pemerintah Sumatera Utara juga telah membuat prosedur standart operasional pelayanan terhadap korban tindak pidana perdagangan khususnya perempuan dan anak. PSO ini juga disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2012 tentang Prosedur standart operasional pelayanan korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.

- g. Pemerintah Sumatera Utara telah melakukan MOU dengan Gubernur Se – Sumatera dalam hal penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan kepala dinas, badan dan kepala biro se-sumatera dimana MOU ini berlaku 5 tahun dan akan berakhir tahun 2017 yang akan datang.
- 5. Pemerintah Sumatera Utara dalam hal ini Biro Pemberdayaan Perempuan tahun 2013 telah membentuk forum Penulis dan Pemerhati Perdagangan Anak (P3A) se – Sumatera Utara untuk upaya pencegahan dan penanganan kasus.
- 6. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara melalui DP3A telah membuat MoU dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur tentang Penanganan Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Langkah-langkah regulasi, perumusan kebijakan dan penyiapan organisasi/struktur pelaksana telah banyak dilakukan di level provinsi Sumatera Utara. Namun demikian langkah-langkah ini tidak diikuti langkah-langkah sistematis dalam keorganisasian di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, Perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat OPD dan budgeting yang memadai di tingkat DPRD maupun OPD.

Kinerja yang dilakukan oleh dinas terkait dalam upaya melakukan pencegahan untuk tingkat provinsi masih dibatasi dengan nomenklatur dan Tupoksi masing-masing OPD. Untuk tingkat provinsi hanya melakukan sebatas koordinasi, pembinaan dan penguatan kapasitas di kabupaten/kota dan hanya dilakukan oleh DP3A. Pada idealnya misalnya Dinas Kesehatan Provinsi, secara struktur dinas kesehatan provinsi tidak memberikan pelayanan langsung kepada korban (kecuali rumah sakit dan sakit epidemic) tetapi fungsi dinas kesehatan provinsi mendorong dan melakukan penguatan pada kabupaten/kota agar kabupaten/kota memberikan pelayanan kepada korban dimana kasus itu terjadi. Namun sayangnya situasi ideal ini tidak terjadi

Untuk DP3A terkait dengan kinerja dalam upaya pencegahan sudah cukup baik karena dalam melakukan sosialisasi tentang pencegahan perdagangan anak selalu melakukan koordinasi dengan gugus tugas provinsi dan kabupaten kota. Proses kerja dan capaiannya, Biro Pemberdayaan Perempuan sendiri telah membentuk forum P3A se-Sumatera dalam upaya pencegahan, tetapi tetap saja untuk level provinsi lebih banyak TUPOKSI nya hanya bersifat Koordinasi.

Beberapa OPD misalnya Dinas Pendidikan, Badan pemberdayaan Masyarakat justru sama sekali tidak menyentuh dalam konteks pencegahan. Khusus untuk dinas pendidikan data yang didapat di provinsi justru dinas mengatakan tidak mempunyai

program tentang pencegahan trafiking baik dalam ekstra kurikuler disekolah-sekolah. Ini memperlihatkan tidak ada komunikasi antara pejabat yang ada di dinas pendidikan dengan pejabat dinas pendidikan yang selalu hadir dalam rapat koordinasi gugus tugas pencegahan perdagangan manusia. Pada level kebijakan sebenarnya dinas pendidikan menjadi koordinator dalam sub gugus tugas pencegahan, yang tentunya harus lebih banyak berperan dimana salah satunya dengan adanya pendidikan luar sekolah ( PLS), sekolah paket dan berbagai macam ketrampilan yang dilakukan oleh dinas pendidikan.

Praktis dalam implementasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia yang berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanganan korban trafiking adalah Biro Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB. Walau fungsinya hanya bersifat Koordinasi tetapi Biro Pemberdayaan Perempuan telah membentuk forum P3A ( Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak), dan telah membuat MOU dengan PKK se- Sumatera Utara dalam rangka untuk melakukan suvervisi dan monitoring terkait desa/kelurahan bebas KDRT dan bebas perdagangan anak. Namun sekali lagi biro ini bukan biro teknis yang artinya tidak memiliki staff dan pendanaan untuk melakukan intervensi pada level pencegahan secara masiv dan penanganan korban sampai tuntas. Hal ini mengakibatkan program pencegahan TPPO sangat minim dan penanganan korban sangat berharap pada NGO atau secepatnya dikirimkan pulang ke wilayah asal.

Bagaimana kinerja dinas terkait dalam pencegahan untuk perdagangan anak dalam negara? Sudah sampai mana proses kerja & capaiannya? Apakah ada program khusus?

Untuk konteks pencegahan perdagangan anak dalam Negara, Pemerintah Sumatera Utara dalam hal ini Biro Pemberdayaan perempuan, lebih banyak melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk konteks pencegahan . Kemudian juga Biro Pemberdayaan Perempuan membangun mekanisme formal dan informal. Dalam mekanisme formal yang dilakukan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan adalah dengan melakukan pertemuan dengan anggota Gugus Tugas untuk mengetahui sampai sejauh mana masing-masing OPD yang terkait dalam pencegahan dan penanganan korban telah melakukan program pencegahan atau penanganan.

Mekanisme lain yang dibangun oleh Biro Pemberdayaan Perempuan adalah dengan melakukan mekanisme informal yaitu dengan pendekatan secara personal atau kontak person. Mekanisme ini memang sangat efektif tetapi juga mempunyai kekurangan karena mekanisme yang dibangun secara personal bukan secara kelembagaan, sehingga ketika kontak person yang selama ini menjadi partner dalam melakukan penanganan korban, ketika tidak menjabat lagi di instansi tersebut, maka Biro Pemberdayaan Perempuan harus memulai dari awal lagi.

Kemudian Biro Pemberdayaan Perempuan juga membangun pola koordinasi yang vertikal, misalnya berkoordinasi dengan Poldasu, Kejatisu, pola koordinasi yang horizontal yang dilakukan sesama OPD kemudian ada pola koordinasi yang fungsional dan ini dilakukan dengan LSM atau organisasi masyarakat. Koordinasi sangat efektif dalam melakukan penanganan kasus perdagangan anak.

Terkait dalam pencegahan TPPO untuk lintas Negara, pihak Imigrasi KLS 1 Medan membuat dalam kebijakan dalam pengurusan passport untuk anak harus disertai oleh kedua orang tua berikut dokumen yang mendukung seperti akte kelahiran, kartu rumah tangga, buku nikah orang tua. Jika salah satu orang tuanya sudah meninggal atau berpisah/cerai maka dalam pengurusan akte tersebut harus melampirkan surat kematian dari kelurahan, surat cerai dan NPWP sehingga pihak imigrasi bisa mengeluarkan passport untuk anak tersebut. Hal ini dilakukan karena untuk menyikapi dari banyak kasus-kasus penjualan anak ke luar negeri. Dan saat ini imigrasi sudah menggunakan sistem lebih baik dalam kepengurusan passport maupun dalam mengambil nomor antri yang sudah memakai waktu.

BP3TKI juga membuat kebijakan dalam melakukan rekrutmen untuk tenaga kerja berkoordinasi dengan PPTKIS yang kemudian akan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja kabupaten kota setempat dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pekerjaan apa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan dari negara tujuan penempatan. Untuk sektor informal penata laksana rumah

tangga (PRT), pemerintah Malaysia dan Indonesia sudah ada moratorium, Indonesia tidak melakukan pengiriman TKI untuk sektor informal ( PRT), yang ada selama ini adalah pekerja yang non prosedural atau ilegal. BP3TKI tidak melakukan kebijakan lagi tetapi sudah melakukan undang-undang N0. 39 tahun 2004 bagaimana melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pedesaan. Secara struktur BP3TKI ada seksi kelembagaan dan pemasyarakatan program, dimana fungsinya adalah melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja kabupaten/kota setempat. Koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat sudah dilakukan, seumpunya ada kasus anak BP3TKI hanya tinggal mengarahkan saja dan biasanya melihat substansi kasusnya ( biasanya bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Dinas Sosial), jika ada delik kasusnya BP3TKI langsung bekerjasama dengan Poldasu.

DP3A Sumatera Utara, Dinas Sosial, Polda Sumut adalah lembaga OPD dan vertikal yang memiliki program khusus untuk perdagangan anak dan tertera dalam nomenklatur. Walaupun begitu nomenklatur ini juga masih menjadi sub-bagian dari dari nomenklatur Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Dinas Sosial, Perlindungan Anak di BPPAKB dan Pelayanan Perempuan dan Anak di Polda Sumut. Sementara untuk OPD lain seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan, tidak memiliki nomenklatur tentang pencegahan perdagangan anak. Dengan demikian, program-program pencegahan perdagangan anak disatukan dengan program perlindungan anak,



penanganan anak yang bermasalah atau pencegahan penyakit sosial di masyarakat.

Situasi ini menyebabkan Untuk budget yang disediakan untuk program pencegahan, tidak diketahui berapa besarnya karena menyatu dengan besaran program lain seperti AMPK atau Perlindungan Anak. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) menjelaskan bahwa mereka selalu mengingatkan kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Biro Pemberdayaan Perempuan untuk memasukan anggaran terkait dengan pencegahan dan penanganan korban trafiking di perencanaan anggaran yang mereka ajukan, namun tidak pernah diajukan. Pada sisi lain, pihak PPAKB dan Dinas Sosial menyatakan mereka selalu mengajukan program namun ditolak oleh Bapeda. Hal ini menunjukkan ketidak harmonisan koordinasi antar lintas OPD sendiri dalam perancangan program Pencegahan TPPO di Sumatera Utara.

## **b. Penanganan**

### **b.1. Tahapan Pengaduan**

Pada praktiknya penerimaan awal korban dapat terjadi dalam 3 cara; yakni korban datang sendiri melakukan pengaduan, rujukan dari lembaga atau pemerintah melakukan penyelamatan atau penjangkauan langsung pada korban. Dalam penanganan pengaduan di Provinsi Sumatera Utara yang aktif dalam penanganan pengaduan bersifat pasif yakni korban datang sendiri ada 3 lembaga, selain

NGO, yakni DP3A, Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dibawah Unit Reskrim dan PKPA. Sementara yang aktif melakukan penjangkauan adalah Poldasu. Ketiga lembaga ini sangat intens dalam penerimaan pengaduan tindak pidana perdagangan anak. Dari banyak nya pengaduan yang diterima dalam kurun waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2011 – 2015 sudah ada 18 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan.

## **b.2. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan**

Sumatera Utara pada tahun 2011 membuat Prosedure Operasional Standart Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. SOP disusun bersama oleh pemerintah dan NGO serta organisasi masyarakat. SOP mengatur mulai dari penanganan pengaduan, identifikasi awal, penanganan lanjutan, perlindungan hukum, repatriasi dan reintegrasi sosial hingga monitoring dan pendataan. Namun sayangnya, SOP ini menjadi dokument yang tidak dipergunakan dalam implementasi penanganan korban. Hal ini disebabkan bukan saja karena budget yang sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi standart penanganan dalam SOP, namun juga setiap OPD yang melakukan penanganan korban memiliki SOP masing-masing dan tidak mau mengacu pada SOP yang telah disusun bersama.

Terkait dengan pelayanan kesehatan atau rehabilitasi phisik korban misalnya, walau selama ini korban tetap direhabilitasi dan

dirujuk ke Rumah Sakit termasuk R.S. Bhayangkara, yang memberikan layanan segera; layanan kegawatdarutan, dan layanan rawat inap. namun rumah sakit tidak mau menggunakan data yang telah dikumpulkan kepolisian. Rumah Sakit akan kembali menginterview anak berulang untuk kebutuhan rumah sakit. Padahal dalam SOP jelas diatur bahwa data interview yang telah dilakukan institusi yang menangani anak sebelumnya untuk dipergunakan dan dihindari interview untuk informasi yang sama secara berulang.

Namun demikian Rumah Sakit pemerintah yakni R.S Pirngadi, RS. Adam Malik dan R.S Bhayangkara memberikan pelayanan kesehatan pada korban. Jenis pelayanan yang diberikan kepada korban yaitu ; pemeriksaan fisik dari kepala hingga ujung kaki, penanganan luka fisik, penanganan gangguan psikologi, penanganan untuk pencegahan penyakit menular, pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan medikolegal berdasarkan permintaan kepolisian.

### **b.3. Rehabilitasi Sosial**

Dalam rehabilitasi sosial korban, idealnya seperti diatur dalam SOP, Dinas Sosial harus banyak berperan, dimana korban ditempatkan di Panti atau rumah aman untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Namun dalam praktiknya Dinas Sosial belum memiliki Rumah Penampungan Sementara (temporary shelter) atau Rumah Aman bagi korban perdagangan manusia. Dinas Sosial hanya dapat

merujuk korban pada panti sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang artinya korban disatukan dengan gelandangan dan pengemis dan penyakit sosial lainnya. Satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki rumah aman adalah Biro PPAKB dimana rumah aman ini berada di bawah koordinasi P2TP2A. Korban anak masih disatukan dengan perempuan dewasa dan juga untuk kasus yang bukan perdagangan manusia, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui pula tenaga pendamping sangat terbatas di rumah aman ini. Dengan demikian Biro PPAKB bekerjasama dengan perguruan tinggi dan NGO untuk bersama melakukan pendampingan korban selama di rumah aman. Pada level inilah dinas sosial juga termasuk institusi yang bekerjasama dengan P2TP2A dan BPPAKB dalam melakukan penanganan korban.

#### **b.4. Reintegrasi Sosial**

Pada tahapan reintegrasi sosial ada dua tahap yang akan dilakukan. Tahap pertama adalah memulangkan korban untuk berkumpul dengan keluarganya, disebut dengan repatriasi, dan yang kedua melakukan pendekatan ke masyarakat dan keluarga agar mereka bisa menerima korban dalam lingkungannya atau disebut dengan reintegrasi sosial. Dalam konteks pemulangan korban ke keluarga/daerah asal, Biro Pemberdayaan Perempuan telah melakukan MOU dengan Pemerintahan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sehingga korban trafiking yang berasal dari kedua daerah tersebut

untuk biaya pemulangan ditanggung oleh masing-masing daerah asal korban. Sementara untuk program pemulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih bersifat estafet, yakni korban dan pendamping harus melapor ke dinas sosial setempat dari propinsi yang dilewati. Misalnya bila korban ada di propinsi Sumatera Utara, dan akan dipulangkan ke Jawa Barat, maka pembiayaan korban dari Sumatera Utara hanya sampai propinsi Riau dan selanjutnya korban harus melapor ke Propinsi Riau untuk mendapat pembiayaan perjalanan sampai propinsi Sumatera Selatan dan seterusnya. Prosedur ini ini dianggap sangat birokratis dan tidak berperspektif korban karena ada kekhawatiran korban akan menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Maka kemudian secara praktis pembiayaan dinas sosial ini jarang dipergunakan. Sementara untuk reintegrasi social khususnya terkait penerimaan masyarakat terhadap korban, masih belum dilakukan. Pemerintah lebih banyak bekerjasama dengan LSM atau organisasi masyarakat untuk upaya-upaya pencegahan korban trafficking terutama korban yang ditrafiking untuk tujuan seksual namun tidak pada upaya penerimaan masyarakat terhadap korban.

#### **b.4. Penegakan dan Bantuan Hukum**

Sesuai dengan gugus tugas PTPPO Sumatera Utara, penegakan dan bantuan hukum berada di bawah koordinasi Poldasu. Penyelenggara untuk penegakan hukum yang telah dilakukan adalah:

1. Unit RENAKTA Poldasu: melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait khususnya dengan Liassion Officer (LO) di luar negeri berkaitan dengan korban TPPO lintas negara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan
2. Kejaksaan : melakukan proses penuntutan pelaku TPPO sekaligus sebagai eksekutor pelaksanaan putusan pidana.
3. Pengadilan: melakukan proses persidangan, pemeriksaan saksi dan barang bukti serta pembuatan keputusan pengadilan.

Dalam penegakan hukum, walau terjadi peningkatan kemampuan para aparaturnya penegakan hukum untuk kasus perdagangan manusia namun koordinasi antara kepolisian, Jaksa dan Hakim harus lebih ditingkatkan. Acapkali antar penegak hukum menggunakan landasan hukum yang berbeda untuk kasus perdagangan anak, kepolisian misalnya menggunakan UUPTPO namun kejaksaan mensarankan penggunaan pasal penculikan dan pencabulan. Memang Dalam proses penyidikan hingga sampai pada proses pengadilan, semua pihak sudah mengikuti dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban namun selama ini restitusi yang seharusnya diberikan pelaku kepada korban belum pernah dilakukan. Riskannya banyak kasus yang putus di pengadilan tidak sesuai yang ditetapkan oleh jaksa penuntut. Misalnya pada kasus korban yang berasal dari Jawa Barat,

Jaksa menuntut hukuman 4 tahun tetapi yang diputuskan oleh pengadilan 3 tahun, dan restitusi yang telah disetujui oleh pengadilan tidak dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

Perda propinsi Sumatera Utara tentang penghapusan perdagangan Perempuan dan Anak sendiri tidak pernah dipergunakan aparat penegak hukum. Padahal sejak keluarnya Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemudian membuat Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Kemudian menyusul kembali dengan dibentuknya Gugus Tugas dan Rencana Aksi P2005-2009 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2005. Setelah itu juga ditetapkan Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian juga ditetapkan Peraturan Gubernur 54 tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Semua produk hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara sudah di sosialisasikan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan ke sebagian besar kabupaten/kota. Tetapi secara teknis memang hal tersebut belum maksimal dilakukan, contohnya salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi tentang Standart

Operasional Prosedur tentang penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan yang disusun hanya sebatas kebijakan diatas kertas , karena secara teknis masing-masing OPD masih memakai pola mereka dalam melakukan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **b.5. Penganggaran Pencegahan dan penanganan anak korban trafficking**

Dalam konteks perencanaan penganggaran masing-masing OPD terkait membuat rencana anggaran ( RPJMD) yang kemudian diajukan ke BAPEDA. Dari sisi perencanaan, RPJMD Sumut dari tahun 2019 - 2023 yang draftnya disusun oleh BAPEDA sudah membuat pokok-pokok pikiran dan naskah akademis. Dalam penyusunan perencanaan tersebut diantaranya didiskusikan dengan pakar-pakar anak. Namun bila ditelaah dalam RPJMD Sumatera Utara termasuk naskah akademisnya, Perlindungan anak dimasukkan hanya dalam program kegiatan dan tidak menjadi kebijakan strategis seperti halnya dalam RPJMN. Dengan demikian Perlindungan anak hanya dilakukan oleh OPD terbatas, tidak menjadi prinsip kerja yang terintegrasi pada seluruh kebijakan dan program OPD. Hal lainnya yang dapat dilihat dalam postur RPJMD maupun RKPD Sumatera Utara, nomenklatur perdagangan anak tidak banyak disebutkan secara



jelas. Perdagangan anak disatukan dengan program perlindungan anak. Padahal program perlindungan anak sangat luas cakupannya.

Koordinasi antara OPD terkait penanganan anak korban trafiking dilakukan dengan melakukan pertemuan formal Gugus Tugas. Namun riskan dalam 2 tahun terakhir ini pertemuan Gugus Tugas tidak dilakukan oleh Biro pemberdayaan Perempuan dan terkait dengan anggaran. Pada sisi yang sama, instansi lain tidak ada yang berinisiatif untuk melakukan pertemuan koordinasi baik untuk seluruh gugus tugas atau pada koordinasi Sub-gugus tugas. Kordinasi yang dibangun adalah koordinasi personal, yang lebih mengandalkan kedekatan antar personal di OPD atau NGO daripada sistem yang bekerja secara otomatis. Penanganan cara ini memang sangat efektif dan cepat namun secara kelembagaan cara ini sama sekali tidak efektif karena di alamnya tidak ada system yang dibangun dan tidak menjamin keberlanjutan.

## **2. Respon Masyarakat Sipil**

### **a. Pencegahan**

Pada dasarnya upaya pencegahan perdagangan anak diinisiasi oleh NGO secara cepat karena mereka bisa bekerja tanpa harus ada nomenklatur. Seperti yang dilakukan oleh KKSP, PKPA, dan PUSAKA. Hampir semua organisasi tersebut melakukan pendidikan tentang pencegahan dimana mereka bisa melakukan sosialisasi ke

sekolah-sekolah. KKSP bekerjasama dengan Indo ACT misalnya, sejak tahun 2004 telah melakukan pendidikan pencegahan perdagangan anak berbasis sekolah dan komunitas remaja di 10 kabupaten kota di Sumatera Utara. Selain itu juga KKSP dan PKPA juga mempunyai model-model pendidikan dalam upaya pencegahan, salah satunya dengan membuat modul-modul pencegahan dan penanganan terhadap korban perdagangan anak. Salah satunya yang dilakukan KKSP yang juga bekerjasama dengan Indo ACT dengan menginisiasi pembentukan jaringan perlindungan anak di desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut sei Tuan, Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa PAsar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin dan Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa. Begitu juga dengan PKPA, dan PUSAKA, masing-masing lembaga juga melakukan penguatan ke masyarakat tentang bahaya dan bagaimana mereka bisa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan anak.

Selain itu baik KKSP, PKPA, dan PUSAKA juga membuat media-media kampanye seperti buku saku, leaflet, brosur, spanduk untuk penyebaran informasi ke masyarakat luas. KKSP melalui program dengan Indo Act melakukan kampanye Hari Anti Perdagangan Anak Sedunia setiap tanggal 12 Desember. Terkait dengan media, FJPI ( Forum Jurnalis Perempuan Indonesia) juga melakukan pengawalan terkait dengan pemberitaan tentang kasus-kasus perdagangan anak.

Sehingga ini merupakan satu media dimana secara tidak langsung melakukan pendidikan terhadap masyarakat luas tentang bahaya trafiking tetapi konteksnya kampanye melalui pemberitaan.

## **b. Penanganan**

Dalam penanganan pengaduan biasanya organisasi tidak melakukan kerja sendiri tetapi bekerja dengan team gugus tugas penghapusan TPPO di Sumatera Utara ( KKSP, PKPA, PUSAKA, PKPA, DP3A, Poldasu dan dinas kesehatan). Pola komunikasi interpersonal yang sekalilagi acapkali dipergunakan. Sejak tidak banyak NGO juga memiliki rumah aman, maka sebagian besar korban dipusatkan di rumah aman P2TP2A/BPPAKB. Maka dalam pelayanan korban dirumah aman tersebut merupakan *sharing budget dan staff* dari pemerintah dan NGO, karena pemerintah sendiri sangat terbatas budgetnya dalam pelayanan korban

Dalam pelayanan kesehatan, biasanya yang dilakukan oleh organisasi sipil adalah meminta surat rujukan dari Biro Pemberdayaan Perempuan untuk merujuk korban ke Rumah sakit Bhayangkara guna mendapat perawatan lebih lanjut. Atau jika korban perlu untuk melakukan visum maka Poldasu akan mengeluarkan surat rujukan ke RS tersebut. Sementara untuk pengobatan ringan bagi korban dilakukan oleh NGO secara swadaya. Semantra untuk rehabilitasi psikis, masing-masing organisasi melakukan kerjasama dengan psikolog guna mengurangi trauma yang diderita korban. Selain itu

juga masing-masing organisasi juga mempunyai konselor dimana pungsinya sama dengan psikolog tetapi memang tidak bisa mengeluarkan rekomendasi apapun. Pada tahap kontak awal hingga pemulangan korban, NGO menugaskan satu orang staff untuk melakukan pendampingan pada korban untuk memastikan korban pendapat perlakuan dan pelayanan semestinya.

Pada sisi lain Dalam konteks Rehabilitasi Sosial, NGO seperti PKPA misalnya melalui Drop in Centre (DIC) memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan seperti salon dan menjahit kepada korban sebelum dia dikembalikan kepada keluarga. Hal ini untuk pembekalan mereka agar mereka tidak kembali menjadi korban. Sementara KKSP melakukan rehabilitasi social dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dimana korban tinggal, agar mereka menerima korban tanpa ada stigma apapun dan membuka komunikasi antara korban dengan masyarakat melalui berbagai media. Sementara untuk korban yang kembali ingin bersekolah maka KKSP memberikan kelas transisi lebih dahulu pada korban sebelum memasukkan kembali anak ke sekolah formal atau sekolah kejar paket A-C.

### **3.Kebijakan dan Program untuk Migrasi anak**

Khusus untuk program migrasi anak, Belum ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Sumatera Utara selain kebijakan migrasi anak yang dikaitkan dengan buruh anak, perdagangan anak dan eksploitasi anak. Secara umum Perda Provinsi

Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak mengandung aturan yang dapat mencegah anak bermigrasi tanpa pengawasan orang tua.

Pasal 7 perda tersebut menegaskan bahwa: Anak yang akan pindah ke luar desa/kelurahan wajib meminta surat pindah dari Kepala Desa atau Lurah dan wajib didampingi orang tua atau wali. Orang tua atau wali wajib memberikan identitas dirinya dan keterangan tentang tujuan anak tersebut pindah (bermigrasi) juga menjelaskan tempat tujuan anak tersebut bermigrasi. Tentu pasal ini tidak relevan untuk anak-anak yang bermigrasi karena bencana alam atau mencari suaka karena persoalannya lebih kompleks. Sementara Sumatera Utara sendiri termasuk kabupaten/kotanya belum memiliki peraturan daerah tentang bencana alam.

Namun demikian belakangan Sumatera Utara telah mengeluarkan perda no. 4 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang juga mengatur perlindungan anak dalam berbagai situasi termasuk perdagangan anak dan eksploitasi seksual. Perda tersebut tentunya memerlukan petunjuk teknis untuk pelaksanaannya oleh OPD.

### **3.1. Pengungsi Pencari Suaka**

Guna mengantisipasi illegal migran, Kemenkumham membentuk tim pengawasan orang asing yang terdiri dari berbagai instansi, seperti kepolisian, angkatan darat, angkatan udara, angkatan

laut, Pemda, kependudukan bahkan sampai kelurahan. Kemenkumham selalu mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Pengawas orang asing dalam pengawasan keberadaan orang asing di wilayah Sumatera Utara.

Untuk pencari suaka Kemenkum HAM menampung mereka di Rudenim dan Community House yang terdapat di Sumatera Utara. IOM memfasilitasi akomodasi mereka selama berada di Indonesia, sedangkan UNHCR memfasilitasi pencarian negara ketiga yang mau menampung imigran pencari suaka ini. Sedangkan untuk pendatang ilegal akan dipulang ke negaranya. Untuk pengungsi anak-anak yang tidak lagi memiliki orang tua, Kemenkumham menempatkannya ke dalam satu tempat khusus yakni di Wisma Virgo-1 Di Jalan Pesantren, Medan Sunggal. Jumlah anak yang berada di tempat penampungan ini adalah 45 orang berasal dari Afghanistan.

## **F. Studi Kasus**

NAMANYANYA Lisna (bukan nama sebenarnya), biasa disapa dengan Lisna. Anak perempuan berusia 16 tahun ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Orang tua Lisna bercerai pada 2017, sehingga ia dan seorang adiknya ikut dengan ibunya, sedangkan dua adiknya yang lain tinggal bersama dengan nenek dari pihak ibunya. Lisna menamatkan SMP pada tahun 2018, ia tak berniat melanjutkan pendidikan karena alasan tidak ada biaya dan ingin bekerja membantu

orang tuanya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari sekaligus membantu biaya sekolah adik-adiknya.

Tanggal 6 Desember 2018, Lisna ditawari bekerja oleh Entin, seorang perempuan berusia 40 tahun, tetangga Lisna. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba, Lisna pun langsung mengiyakan tawaran Entin untuk bekerja sebagai kasir di sebuah restoran di Medan dengan gaji Rp.1.000.000,- per bulan. Apalagi orang tuanya mengizinkan.

Pada 18 Desember 2018, Entin memberangkatkan korban menuju Jakarta dengan menggunakan bus. Sesampai di Jakarta, Lisna dijemput oleh seorang perempuan yang ia tidak kenal—tapi kemudian hari dikenal sebagai istri Andreas Ginting. Pada 19 Desember 2018, Lisna diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya, dan sesampai di Bandara Polonia, ia dijemput oleh Andreas Ginting. Kepada Lisna, Andreas memperkenalkan diri sebagai pemilik restoran tempat Lisna akan bekerja.

Sesampai di tempat bekerja, Lisna terkejut bukan kepalang, karena apa yang dibilang restoran sebagai dijanjikan oleh Entin ternyata adalah kafe. Kafe Pesona namanya. Kafe ini ramai dikunjungi pada malam hari dan hingar bingar dengan suara musik. Kafe ini juga menjual minuman keras. Dan keterkejutan Lisna bertambah, karena

bukannya dipekerjakan sebagai kasir, ia malah dijadikan sebagai pelayan (*waiterss*).

20 Desember 2018 adalah hari pertama bekerja. Ia diberi seragam baju kaos tipis warna putih dan kuning tanpa lengan dan celana hot pants dan rok mini. Jam kerjanya adalah 20.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB. Ia dijanjikan upah Rp.350.000,- dalam sebulan. Sehari bekerja, Lisna juga tahu, kalau di kafe ini juga menyediakan tarian-tarian erotis bagi pengunjungnya.

\*\*\*

Pada 8 Januari 2018, ketika Lisna sedang terlelap karena lelah bekerja, Andreas datang dan membangunkannya. “Kamu ikut ke rumah baruku orang tuaku, ya!” kata Andreass.

“Sama siapa?” tanya Lisna.

“Dengan pembantuku!”

Lisna kemudian mengikuti ajakan Andreas. Dengan mobil yang disupiri oleh Andreas mereka sama-sama menuju rumah baru Andreas. Namun sesampai di rumah baru, Andreas mengajak Lisna keluar rumah, dan ketika ia menanyakan mengapa pembantunya tidak ikut, Andreas mengatakan bahwa mereka akan bersih-bersih di rumah baru orang tuanya.



Setelah berkeliling kota, Lisna di ajak ke sebuah hotel—yang Lisna tidak apa namanya. Lisna bertanya, “Mengapa kita ke hotel?” Andreas menjawab: “Biar adem!” Mereka lalu masuk ke hotel tersebut. Andreas kemudian memesan makanan, setelah makan Andreas mengajak Lisna masuk ke kamar, namun Lisna menolak. Andreas kemudian mengancam, “Tenanglah! Aku tak bakal ngapa-ngapain, aku mau tanggung jawab sama kami. Aku akan belikan rumah, mobil, dan motor. Tapi awas kalau kamu kabur, nanti ketemu di Sukabumi, kamu bahaya terus!”. Dibawah ancaman akhirnya Lisna pasrah diperkosa oleh Andreas. Setelah kejadian tersebut mereka kembali ke kafe.

Pada 16 Januari 2019 karena sudah merasa tertekan bekerja di kafe akhirnya Lisna melarikan diri. Ia dibantu oleh Marlan, warga Medan yang juga dulunya pernah bekerja di Kafe Pesona. Sebelumnya Lisna telah menceritakan apa yang dialaminya kepada Marlan, dan meminta kepada Marlan agar menolongnya keluar dari café tersebut. Marlan kemudian membawa Lisna ke rumahnya.

### **Analisa Kasus**

1. Kasus yang dialami oleh Lisna dapat dipastikan adalah kasus trafiking anak, karena memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: yakni unsur cara, proses, dan tujuan. Khusus

untuk unsur cara, walaupun sudah terpenuhi: yakni adanya penipuan dimana korban dijanjikan pekerjaan sebagai kasir di restoran tapi ternyata dipekerjakan di café, tapi karena Lisna masih berumur 16 tahun pada saat kasus ini terjadi, maka unsur itu dapat diabaikan.

2. Perekrutan dilakukan oleh Entin (Tetangga) korban yang merupakan orang suruhan dari Andreas Ginting (Pelaku Utama) yang menjanjikan pekerjaan sebagai kasir di sebuah restoran di Medan dengan gaji Rp.1000.000,- per bulan, padahal setelah sampai di Medan pekerjaan sebenarnya adalah waitress di sebuah café hiburan malam dengan gaji Rp.350.000,- per bulan.
3. Daerah asal kasus ini adalah Sukabumi (Jawa Barat), korban kemudian dibawa transit oleh Entin ke Jakarta (wilayah transit), tinggal di Jakarta selama 1 hari di rumah isteri pelaku, dan diberangkatkan sehari kemudian melalui pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Polonia Medan (wilayah tujuan). Korban kemudian dijemput oleh pelaku dan dibawa ke tempat bekerja yakni kafe hiburan malam.
4. Eksploitasi yang dialami oleh korban adalah eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Bekerja di kafe hiburan malam adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (the worst form) sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO. Pelaku juga telah mengeksploitasi korban secara seksual dengan pemerkosaan.

5. Koordinasi penanganan kasus terlihat berjalan sangat baik. Korban awalnya melapor ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kemudian kepolisian berkoordinasi dengan PKPA, dan seterusnya PKPA berkoordinasi dengan DP3A. Korban kemudian ditempatkan di rumah aman milik P2TP2A. Untuk pendampingan hukum dilakukan oleh PKPA, PKPA, Pusaka Indonesia, dan P2TP2A. Koordinasi juga dilakukan dengan PKPA dan DP3A Jawa Barat untuk reintegrasi korban ke daerah asal.
6. Ada upaya pelaku agar kasus ini tidak dilanjutkan secara hukum, yakni dengan menghubungi orang tua korban, dan dengan berbagai cara mendesak orang tua korban membuat surat pencabutan pengaduan di kepolisian. Pelaku juga mengadu domba keluarga korban dengan PKPA: menuduh PKPA menahan korban dan menghalangi orang tuanya berjumpa dengan anaknya—padahal yang terjadi korban ditempatkan di rumah aman.
7. Kejaksaaan dalam tuntutanannya menyatakan kasus ini adalah kejahatan trafiking dan menuntut korban dengan penjara 4 tahun penjara dengan denda Rp.120.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
8. Pihak korban melalui tim hukumnya juga mengajukan gugatan restitusi kepada pelaku dengan jumlah: Rp.79.700.000,-. Restitusi sebagaimana yang digugat oleh pihak korban termaktub dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (13) undang-undang tersebut

menyatakan “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”

9. Pihak tergugat sendiri (tersangka) melalui penasehat hukumnya menyanggah gugatan tersebut sebagai kabur dan tidak jelas (obscur libel).
10. Majelis hakim PN Medan memutuskan pelaku terbukti melakukan tindak pidana trafiking dan menghukum 3 (tiga) tahun penjara dengan denda 120.000.0000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Majelis hakim juga mengabulkan gugatan restitusi korban untuk sebahagian yang sebesar Rp. 64.700.000,-
11. Putusan restitusi korban ini merupakan putusan pertama di Sumatera Utara, walaupun disayangkan tidak bisa dieksekusi, karena menurut pihak kejaksaan dan pengadilan belum ada aturan pelaksana dari restitusi tersebut.

## **G. Kompilasi Regulasi Propinsi Sumatera Utara Tentang Perdagangan Anak**

1. Perda No. 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
2. Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk periode 2005-2009 dan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang

ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 tahun 2005.

3. Rencana Aksi Provinsi yang kedua tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk jangka waktu 2010 – 2015.
4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara. Gugus Tugas ini juga sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak pidana perdagangan orang.
5. Pembentukan Forum Penulis dan Pemerhati Perdagangan Anak (P3A) se – Sumatera Utara untuk upaya pencegahan dan penanganan kasus.
6. MoU dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur tentang Penanganan Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penanganan perdagangan anak di Sumatera Utara ditinjau dari kebijakan, program, sumber daya manusia, dan keuangan. Penelitian yang dilatarbelakangi oleh penelitian tentang anak ini adalah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum pernah dikaji bagaimana pelaksanaan kewajiban empat negara tersebut. Untuk itu, penting untuk dilihat dan dipelajari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian menangani perdagangan anak di Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara dan pengumpulan data sekunder. Adapun dari hasil penelitiannya diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak setelah sebelumnya telah menandatangani Peraturan Daerah tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak pada tahun 2005. Demikian pula yang dibuat oleh Provinsi Sumatera Utara. SOP penanganan. Namun, masalah koordinasi dan sinergi antar lembaga masih menjadi tantangan. Data juga masih menjadi masalah terutama dalam menghilangkan data yang berulang-ulang. Hal ini

membutuhkan perhatian antar pemangku kepentingan dalam penanganan perdagangan anak di Sumatera Utara.

## 2. Saran

- a. Penting Bagi pemerintah Provinsi. Lembaga, penegak hukum dan pemangku kepentingan lain untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam penanganan korban perdagangan anak
- b. Perguruan tinggi perlu melakukan penelitian mendalam terkait nilai ekonomi dalam kejahatan perdagangan anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arya. 2010. *Kekerasan Dalam Pacaran*. Artikel. <http://belajarpsikologi.com>. Diakses tanggal 10 Juli 2011.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
- Ch, Mufida. 2004. *Paradigma Gender*. Malang: Bayu Media.
- Chuisairi, A. 2000. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. *Jurnal Arkhatipe*, 1(1), 4-13
- Daymont, Cristine. 2008. *Metode Riset Kualitatif*. Jakarta: Bentang.
- Engel, B. 2002. *The Emotionally Abusive Relationship: A Breakthrough Program to Overcome Unhealthy Patterns*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fromm, Erich. 2010. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Henslin, James. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi* Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Harry A. Poeze: Tan Malaka, *Pergulatan Menuju Republik 1897-1925*, hal.109



- Jones, Pip. 2009. Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartono, Kartini. 2007. Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kinloch, Graham C. 2005. Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi. Bandung: Pustaka Setia.
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 55 dan 56.
- Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa", 1992), hal. 435
- P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 585.
- Michael Levi (1994) Violent Crime, The oxford Handbook of Criminology, Mike Maguire, Rod Morgan, and Robert Reiner (eds) Oxford, Clarendon Press,
- Mulyana, Deddy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM. Magelang: Yayasan Indonesia Tera Anggota Ikapi.

- Pandu, Maria E. 2009. Sosiologi Keluarga. Makassar: Makalah Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Ritzer, George & Douglas. 2008. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Thomas. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- Semiawan, Conny R. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setyawati, K. 2010. Studi Eksploratif Mengenai Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Kekerasan Dalam Pacaran (Dating Violence) di Kalangan Mahasiswa. Skripsi. Surakarta. Fisip Universitas Sebelas Maret.
- Subhan, Zaitunah. 2004. Kekerasan terhadap Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sutinah Sutinah and Karen Mwende, Trafficking of Women and children in East Java, Indonesia, Journal of International Women Studies, volume 20, December 2019

The Jakarta Post, “Indonesia Lags in Dealing with Trafficking,” 29 July 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/29/indonesia-lags-dealing-with-trafficking.html>

UNICEF-Indonesia, “Overview Child Protection <http://www.unicef.org/indonesia/protection.html> (last visited Jan. 28, 2010), dikutip dari The Protection Project (2009) A Human Rights Report on Trafficking in Persons, Especially Women and Children <http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Indonesia.pdf>

Warsana, W. 1992. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung. Yogyakarta

## BAB V

## LAMPIRAN

### Photo Kegiatan





## LAMPIRAN II GUIDELINE INTERVIEW

### **Guideline Interview Situasi Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Petunjuk: Guideline Ini ditanyakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil dan juga dipergunakan dalam mengumpulkan data sekunder berkenaan dengan situasi korban tindak perdagangan anak

1. Seberapa besarkah atau sebanyak apakah kasus-kasus perdagangan anak di Sumut tahun 2019 ( dibutuhkan data rentang usia anak yang menjadi korban, kabupaten/kota yang memiliki kasus perdagangan anak terbesar)?
2. Bagaimana anda mengidentifikasi bahwa kasus yang anda sebutkan adalah kasus perdagangan anak?
3. Apa penyebab umum dan latar belakang utama anak-anak terjebak menjadi korban perdagangan anak di Sumut?
4. Apakah ada pergeseran penyebab atau latar belakang anak menjadi korban perdagangan anak pada tahun 2019?
5. Bila ada (pertanyaan no 4) Seperti apakah pergeseran penyebab terjadinya kasus-kasus perdagangan anak di Sumut?
6. Dari daerah mana sajakah ( propinsi dan atau kabupaten) daerah asal anak yang diperdagangkan yang berada di Sumut atau transit melalui Sumut?

7. Seperti apakah rute anak yang diperdagangkan yang berasal dari luar propinsi anda (dari daerah asal hingga ke wilayah tujuan)?
8. Seperti apakah rute anak yang diperdagangkan yang berasal dari dalam propinsi anda (dari daerah asal hingga ke wilayah tujuan)?
9. Apakah ada perubahan rute anak yang diperdagangkan selama 2019 ? Bila ada dapatkah anda jelaskan perubahan tersebut ?
10. Siapa sajakah pelaku utama dalam jaringan kejahatan perdagangan anak di Sumut atau daerah anda ?
11. Bagaimana pola jaringan kejahatan perdagangan itu dalam merekrut, mentransit, hingga menempatkan anak yang diperdagangkan di propinsi anda atau keluar dari propinsi anda?
12. Bagaimana cara rekrutment anak yang menjadi korban perdagangan di propinsi anda; di jual, di tipu, dipaksa, di culik, diancam dll ( jika ada) ?
13. Apakah ada perubahan cara rekrutmen anak menjadi korban perdagangan anak di propinsi anda di 2019 ? Bila ada seperti apakah perubahan tersebut ?
14. Seperti apakah bentuk-bentuk eksploitasi utama pada anak korban perdagangan orang di Sumut atau daerah anda ?
15. Seperti apakah kekerasan utama yang dialami anak korban perdagangan anak di Sumut dan daerah anda?